Bulletin of Monetary Economics and Banking

Volume 5 | Number 4 Article 3

3-31-2003

KAJIAN KINERJA INDUSTRI BPRS DI INDONESIA

Ahmad Buchori

Bambang Himawan

Edi Setijawan

Nyimas Rohmah

Follow this and additional works at: https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb

Recommended Citation

Buchori, Ahmad; Himawan, Bambang; Setijawan, Edi; and Rohmah, Nyimas (2003) "KAJIAN KINERJA INDUSTRI BPRS DI INDONESIA," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*: Vol. 5: No. 4, Article 3.
DOI: https://doi.org/10.21098/bemp.v5i4.318
Available at: https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol5/iss4/3

This Article is brought to you for free and open access by Bulletin of Monetary Economics and Banking. It has been accepted for inclusion in Bulletin of Monetary Economics and Banking by an authorized editor of Bulletin of Monetary Economics and Banking. For more information, please contact bmebjournal@gmail.com.

KAJIAN KINERJA INDUSTRI BPRS DI INDONESIA

Ahmad Buchori, Bambang Himawan, Edi Setijawan, Nyimas Rohmah *)

Abstrak

*Keberadaan bank syariah di Indonesia telah diakui secara formal dengan diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), BI memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai pengatur sekaligus pengawas bank, termasuk BPRS. Sebagai pelaksanaan salah satu fungsi pengawasan, Bank Indonesia telah menerapkan standar tingkat kesehatan berdasarkan CAMEL yang berlaku bagi bank umum syariah maupun BPRS. Penggunaan CAMEL yang lazim diterapkan terhadap bank umum (***commercial bank****) dalam menilai kinerja BPRS, tampaknya kurang sesuai mengingat terdapat kekhususan tujuan pendirian dan operasional BPRS.*

Tujuan pendirian BPRS adalah untuk melayani masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh bank umum. Sedangkan dari sisi operasional, berdasarkan undang-undang, terdapat beberapa pembatasan bagi BPRS seperti tidak diperkenankannya menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dan penyertaan modal. Lebih jauh dilihat dari karakteristiknya yang relatif sama dengan lembaga keuangan mikro (LKM), terdapat pendapat yang menyatakan bahwa BPRS dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis LKM. Beberapa ahli dalam bidang lembaga keuangan mikro telah mengungkapkan suatu kerangka pengukuran kinerja tersendiri bagi LKM, antara lain penggunaan metode Performance Indicators *(PI). Kerangka pengukuran tersebut terdiri dari kumpulan rasio keuangan yang secara operasional sangat signifikan dalam menilai kinerja suatu LKM.*

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran deskriptif yang komprehensif mengenai kinerja BPRS di Indonesia dengan menggunakan metode Performance Indicators *(PI), guna pengembangan BPRS yang lebih sesuai dengan visi dan misi Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas bank. Disamping itu, penggunaan PI sebagai alat ukur penilaian kinerja BPRS diharapkan akan memberikan wacana pemikiran atas adanya alternatif metode penilaian kinerja BPRS untuk penyempurnaan perangkat pengawasan BPRS.*

* Tim Peneliti di Biro Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberadaan bank syariah di Indonesia telah diakui secara formal dengan diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut undang-undang tersebut, terdapat dua jenis bank syariah di Indonesia yaitu bank umum syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1991 di Jawa Barat. Sampai dengan bulan Oktober 2002, jumlah BPRS di Indonesia tercatat sebanyak 83 buah yang tersebar di 25 wilayah Kantor Bank Indonesia.

Sementara itu dalam Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai pengatur sekaligus pengawas bank, termasuk BPRS, guna mendorong praktek perbankan yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam menilai kinerja suatu bank, sebagai pelaksanaan salah satu fungsi pengawasan, Bank Indonesia telah menerapkan standar tingkat kesehatan yang berdasarkan pada lima komponen utama yaitu permodalan (*Capital*), kualitas aset (*Asset Quality*), kualitas manajemen (*Management*), profitabilitas (*Earning*), dan tingkat likuiditas (*Liquidity*) atau dikenal dengan istilah CAMEL. Standar tingkat kesehatan berdasarkan CAMEL merupakan kerangka penilaian yang sudah diterima secara internasional yang mengacu pada *Basle Committee on Banking Supervision*. Pengukuran tingkat kesehatan BPRS sementara ini menggunakan kerangka yang sama dengan bank umum syariah kecuali untuk beberapa komponen tertentu seperti unsur risiko valas dan transaksi giro.

Penggunaan CAMEL yang lazim diterapkan terhadap bank umum (*commercial bank*) dalam menilai kinerja BPRS, tampaknya kurang sesuai mengingat terdapat kekhususan tujuan pendirian dan operasional BPRS. Tujuan pendirian BPRS adalah untuk melayani masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh bank umum. Sementara itu berdasarkan undang-undang, BPRS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank umum seperti menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. BPRS juga dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dan penyertaan modal.

Lebih jauh dilihat dari karakteristiknya yang relatif sama dengan lembaga keuangan mikro (LKM), terdapat pendapat yang menyatakan bahwa BPRS dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis LKM. Beberapa ahli dalam bidang lembaga keuangan mikro telah mengungkapkan suatu kerangka pengukuran kinerja lembaga-lembaga keuangan mikro, antara lain *Performance Indicators* (PI). Kerangka pengukuran tersebut terdiri dari kumpulan

rasio keuangan yang secara operasional sangat signifikan dalam menilai kinerja suatu LKM.

Dengan melihat hal-hal tersebut di atas, pengukuran kinerja BPRS yang dilakukan Bank Indonesia selama ini dengan menggunakan metode penilaian yang sama dengan bank umum syariah sebagai alat *early warning system* (EWS) tampaknya perlu dipertimbangkan kembali. Sehubungan dengan hal tersebut, penilaian kinerja BPRS dengan menggunakan metode PI patut dijadikan salah satu alternatif penyempurnaan perangkat EWS.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran deskriptif yang komprehensif mengenai kinerja BPRS di Indonesia dengan menggunakan metode *Performance Indicators* (PI). Dengan diketahuinya kinerja BPRS di Indonesia, diharapkan arah pengembangan BPRS akan lebih sesuai dengan visi dan misi Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas bank. Disamping itu, penggunaan PI sebagai alat ukur penilaian kinerja BPRS diharapkan memberikan wacana pemikiran adanya alternatif penyempurnaan perangkat EWS.

TINJAUAN TEORITIS

Sistem Perbankan Di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, jenis bank di Indonesia terdiri dari dua kelompok yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Perbedaan antara bank umum dengan BPR antara lain pada pembatasan produk dan jasa perbankan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, cakupan kegiatan operasional, permodalan dan kepemilikan.

Sementara itu, dilihat dari dasar kegiatan operasionalnya bank dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional (bank konvensional) dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional terutama pada produk dan jasa perbankan yang ditawarkan. Bank syariah memiliki karakteristik antara lain tidak menggunakan instrumen bunga, menggunakan metode bagi hasil dan jual beli, melarang kegiatan yang bersifat spekulatif, senantiasa terkait dengan sektor riil dan hanya memberikan pembiayaan yang halal. Selain itu bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki fungsi sebagai *sharia internal auditor*. Penunjukkan

anggota DPS harus mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu otoritas pengawas syariah untuk lembaga keuangan dan perbankan syariah yang juga merupakan institusi yang berhak mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan produk / jasa dan operasional bank syariah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank umum dapat memilih satu dari tiga pilihan yaitu seluruhnya beroperasi secara konvensional, seluruhnya beroperasi secara syariah, atau melakukan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (*dual system bank*). Bagi bank umum konvensional yang beroperasi dengan *dual system bank*, harus menyisihkan modal tersendiri untuk kegiatan operasional syariahnya dan membentuk unit usaha syariah (UUS) di kantor pusatnya yang akan melakukan pemantauan terhadap kantor cabang syariahnya. Seperti halnya bank yang beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip syariah, maka bank umum konvensional yang memiliki UUS juga wajib memiliki DPS.

Berbeda dengan bank umum, sejauh ini BPR tidak diperkenankan untuk menjadi *dual system bank*. Dengan kata lain BPR hanya memiliki dua pilihan dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu beroperasi secara konvensional atau secara syariah (BPRS).

Karakteristik BPRS dan Keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Mikro

Kegiatan usaha BPRS secara umum tidak berbeda dengan kegiatan usaha BPR konvensional, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya BPRS harus sejalan dengan prinsip syariah. Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa operasional BPRS meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan / atau tabungan pada bank lainnya. BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian.

BPRS hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau kombinasinya. Modal untuk mendirikan BPRS adalah Rp2 milyar untuk wilayah Jabotabek, Rp1 milyar untuk ibukota propinsi, dan Rp500 juta di luar Jabotabek dan ibukota propinsi. Modal disetor BPRS tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk kegiatan yang melanggar hukum. BPRS dalam mengembangkan usahanya diperkenankan membuka kantor cabang namun dibatasi

hanya dalam wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya. Sedangkan untuk membuka kantor kas, hanya dapat didirikan dalam wilayah kabupaten / kotamadya yang sama dengan kantor induknya.

Manajemen BPRS terdiri dari minimal dua orang anggota direksi dan satu orang komisaris serta satu orang DPS. Jumlah direksi minimal dua orang dengan pendidikan minimal diploma III dan 50% diantaranya wajib memiliki pengalaman operasional perbankan syariah sedangkan bagi direksi yang tidak berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah. Komisaris BPRS wajib memiliki pengalaman dan / atau pengetahuan di bidang perbankan syariah. Untuk menjaga kemungkinan kolusi maka seorang direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya dan anggota dewan komisaris.

Keberadaan BPRS juga memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan usaha kecil dan mikro (UKM) baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mengacu kepada kategorisasi lembaga keuangan mikro (LKM) yang dilakukan oleh Greuning, Gallardo dan Randhawa (1999)[1] , BPRS dapat dimasukkan dalam LKM dengan kategori C yaitu LKM yang sumber dananya terutama berasal dari masyarakat umum dengan cara menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito. Selain memiliki pengawas internal (Komisaris dan DPS), BPRS juga diawasi oleh institusi pengawas eksternal yaitu Bank Indonesia. Institusi pengawas eksternal berkepentingan untuk mengawasi BPRS sebagai LKM yang menghimpun dana dari masyarakat untuk menjaga kepentingan deposan / penabung dan institusi perbankan sebagai lembaga kepercayaan.

Secara umum BPRS memiliki tujuan dan karakteristik yang relatif sama dengan LKM lainnya. LKM memiliki dua tujuan utama yang harus dicapai sekaligus, yaitu komersial dan pengembangan masyarakat. Komersial artinya LKM dalam menjalankan usahanya harus memperoleh keuntungan agar aktivitasnya dapat terjaga *(sustainable)* dan kemampuan melayani nasabah semakin meningkat *(outreach).* Hal tersebut erat kaitannya dengan tujuan kedua yaitu pengembangan masyarakat. Masyarakat yang menjadi target LKM adalah yang kurang atau tidak terlayani oleh perbankan komersial. Untuk itu LKM memiliki misi untuk menurunkan tingkat kemiskinan, memberdayakan wanita dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengembangkan usaha nasabahnya yaitu UKM .

1 Greuning, Gallardo dan Randhawa menyatakan bahwa LKM dapat dikategorikan kedalam tiga kategori besar yaitu kategori A adalah LKM yang tergantung pada bantuan lembaga donor, kategori B adalah LKM yang tergantung pada iuran anggota, dan kategori C adalah LKM yang menghimpun dana dari masyarakat. Lihat Hennie van, Greuning, Joselito Gallardo dan Bikki Randhawa dalam tulisannya "A Framework for Regulating Microfinance Institutions (a policy research working paper)", World Bank, 1999.

Agar dapat memberikan pelayanan terhadap UKM, LKM perlu memahami karakteristik dari UKM, seperti: apakah nasabahnya baru memulai suatu bisnis atau telah menjalankan bisnis, apakah usahanya sedang tumbuh berkembang, stabil atau tidak stabil, dan apakah sektor usaha dari nasabahnya (pertanian, perdagangan, industri kecil), dan lain sebagainya. Dengan memahami karakteristik nasabahnya, LKM dapat menentukan jenis produk dan jasa keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabahnya *(client oriented)*. Kesalahan dalam menawarkan jenis produk dan jasa keuangan dapat menciptakan masalah seperti pembiayaan non lancar atau produk dan jasa keuangan tersebut tidak menarik bagi nasabahnya.

Dilihat dari aktivitasnya, LKM dapat dibagi menjadi dua yaitu yang semata-mata berfungsi sebagai lembaga intermediasi dan yang juga memberikan jasa lainnya. LKM yang hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan merupakan LKM yang menggunakan pendekatan minimalis *(minimalist approach)*. Adapun LKM yang selain menjalankan fungsi intermediasi keuangan juga menjalankan fungsi-fungsi lainnya seperti *social intermediation*, *enterprise development services* dan *social services*, merupakan LKM yang menggunakan pendekatan integratif *(integrative approach)*. Pendekatan yang terakhir tentunya akan meningkatkan upaya pencapaian tujuan kedua LKM yaitu pengembangan masyarakat. Namun demikian beberapa hal yang harus diperhatikan apabila LKM hendak menggunakan *integrative approach* adalah kemungkinan timbul konflik pencapaian tujuan jika tidak dapat menyelaraskan antara tujuan komersial dengan tujuan pengembangan masyarakat bahkan dapat saling berlawanan. Pendekatan tersebut juga terkadang menimbulkan kerancuan nasabah karena berpendapat bahwa jasa komersial sama dengan jasa pengembangan masyarakat yang pada umumnya bersifat cuma-cuma.

Beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh LKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat meliputi (a) kejelasan visi, misi dan rencana kerja yang realistis, (b) dukungan yang kuat dari pemilik, manajemen dan staf, (c) menyediakan produk/jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan prosedur yang sederhana, (d) berfungsinya manajemen perencanaan dan pengendalian secara efektif dan efisien yang didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai serta secara berkelanjutan mampu secara operasional maupun finansial. Selanjutnya Wright (2000)[2], juga menjelaskan karakteristik yang harus dimiliki oleh LKM yang sukses (*best practices*) yaitu:

- LKM terlibat secara aktif mengkondisikan target nasabah agar memiliki kesiapan menerima pembiayaan,
- LKM menciptakan suatu sistem yang permanen dan berkesinambungan yang mampu

2 Wright, Graham AN, Microfinance System, Desigining Quality Financial for the Poor, The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh, 2000, p.130

memberikan jasa / produk keuangan yang berkualitas kepada nasabahnya,

- LKM membiasakan nasabah untuk menabung sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut,
- pembiayaan tidak mengandung subsidi atau mendasarkan pada harga pasar,
- pembiayaan diberikan kepada perorangan bukan kelompok namun menggunakan kelompok sebagai mekanisme tanggung renteng. Pemberian pembiayaan tersebut juga harus dalam jangka pendek untuk mengurangi risiko, dan
- memberikan kesempatan kepada nasabah yang memiliki catatan pembiayaan *(track record)* yang baik untuk memperoleh pembiayaan yang lebih besar.

Pola Pengawasan BPRS

Dalam sistem perbankan di Indonesia, tugas pengaturan dan pengawasan bank, termasuk BPRS, dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya Bank Indonesia memiliki hak mengatur, hak memberi dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, hak untuk mengawasi dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia terutama ditujukan agar bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan operasionalnya serta memberikan lingkungan yang kondusif bagi perbankan nasional agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Dalam kaitan dengan ketentuan kehati-hatian, Chaves and Gonzalez-Vega (1994)[3] mendefinisikan sebagai seperangkat prinsip atau aturan yang tujuan utamanya adalah memberikan kontribusi bagi beroperasinya lembaga dan pasar keuangan secara efisien dan stabil.

Dalam melakukan pengawasan bank, Bank Indonesia menerapkan dua pendekatan yaitu *on-site supervision* dan *off-site supervision*. *On-site supervision* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan yang bersifat reguler / umum maupun spesial yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dalam operasional bank, kepatuhan terhadap ketentuan perbankan yang berlaku serta kemungkinan terjadi penyimpangan terhadap operasional bank. *Off-site supervision* dilakukan dengan mewajibkan bank secara berkala menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia maupun masyarakat untuk mewujudkan *transparency* dan *accountability* dalam industri perbankan nasional. Laporan tersebut juga berfungsi sebagai alat pemantauan dini bagi pengawas bank maupun pemantauan lalu

3 Chaves and Gonzalez-Vega, Principles of Regulation and Prudential Supervision and their Relevance for Microinterprise Finance Organizations, 1994.

lintas pembayaran serta penetapan target-target moneter dalam rangka pengendalian Rupiah yang merupakan tugas utama Bank Indonesia. Graham AN Wright (2000)[4], menjelaskan bahwa peraturan di bidang keuangan harus mengacu kepada tujuan-tujuan makro. Peraturan tersebut untuk dapat memastikan bahwa industri keuangan beroperasi secara sehat, kompetitif, efisien, berfungsinya intermediasi keuangan sekaligus dapat melindungi kepentingan masyarakat selaku investor / penabung / deposan dari praktek pengelolaan yang tidak sehat.

Hingga saat ini pola pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada dasarnya tidak membedakan antara bank umum dengan BPR, maupun antara bank syariah dengan bank konvensional. Pola pengawasan BPR lebih merupakan derivasi dari pengawasan bank umum. Pada *on-site supervision*, secara reguler (minimum 1 kali dalam 1 tahun) dilakukan pemeriksaan umum yang bertujuan melihat kinerja bank dikaitkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan dan prinsip kehati-hatian serta kemungkinan terdapatnya penyimpangan. Pemeriksaan terhadap bank syariah juga bertujuan untuk menilai apakah bank secara konsisten mentaati prinsip-prinsip syariah. Selain pemeriksaan umum, dapat pula dilakukan pemeriksaan khusus *(special surveillance)* apabila terdapat indikasi-indikasi yang membahayakan operasional bank. Hasil pemeriksaan berupa penilaian tingkat kesehatan serta *action plan* bank untuk memperbaiki kinerjanya.

Penilaian Kinerja BPRS

Penilaian kinerja BPRS oleh Bank Indonesia saat ini dilakukan melalui penilaian tingkat kesehatan bank dengan cara mengkuantifikasikan dua aspek yaitu:

1. CAMEL yang mencakup *Capital Adequacy Ratio* (rasio kecukupan modal), *Asset Quality* (kualitas aktiva produktif), *Management* (kualitas manajemen dalam mengelola organisasi dan risiko), *Earning* (kemampulabaan) dan *Liquidity* (kemampuan bank memenuhi kewajiban-kewajibannya). Masing-masing unsur dari CAMEL memiliki bobot yang berbeda tergantung tingkat kandungan risikonya. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki kandungan risiko tertinggi karena BPRS memiliki keterbatasan modal dan relatif sulit untuk menambah modal, sehingga apabila terjadi *mismatch* akan segera mempengaruhi kondisi bank secara keseluruhan. Unsur lain yang mendapat bobot tertinggi adalah Kualitas Aktiva Produktif (KAP), karena penanaman dana utama BPRS adalah pada aktiva produktif khususnya pembiayaan. Apabila jumlah pembiayaan bermasalah semakin meningkat, akan langsung mempengaruhi rentabilitas bank dan selanjutnya akan mengikis modal. Untuk itu CAR dan KAP memiliki bobot sebesar 30%. Selanjutnya

4 Wright, Graham AN, Microfinance System, Desigining Quality Financial for the Poor, The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh, 2000, p.87

secara berurutan unsur manajemen memiliki bobot 20%, sedangkan unsur kemampulabaan dan likuiditas memiliki bobot 10%.

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagai pelengkap Metode CAMEL. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat mengurangi tingkat kesehatan secara keseluruhan.

Pengawas Bank Indonesia dapat melakukan *professional judgement* dengan menurunkan tingkat kesehatan bank menjadi tidak sehat. Hal ini dilakukan apabila dijumpai fakta-fakta seperti adanya perselisihan intern, adanya campur tangan pihak tertentu (intervensi) dalam manajemen bank, praktek *window dressing*, dan praktek bank dalam bank serta praktek perbankan lainnya yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

Penilaian tingkat kesehatan dapat dipakai sebagai tolok ukur bagi pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan prinsip operasional bank yang sehat dan hati-hati, termasuk dalam mengelola risiko-risiko yang ada. Penilaian tingkat kesehatan juga dijadikan sebagai tolok ukur dalam menerapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun industri, serta dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam perizinan, baik persetujuan maupun pencabutan kegiatan usaha tertentu dan kelembagaan. Penilaian tingkat kesehatan juga dijadikan sebagai penentuan status apakah suatu bank harus mendapat pengawasan khusus atau tidak.

Tingkat kesehatan BPRS digolongkan dalam empat kategori yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat. Penggolongan tingkat kesehatan tersebut didasarkan atas pencapaian nilai kredit sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Kriteria Predikat Tingkat Kesehatan Bank

NILAI KREDIT	PREDIKAT
81 - 100	Sehat
66 - <81	Cukup Sehat
51 - <66	Kurang Sehat
0 - 51	Tidak Sehat

Selain CAMEL, metode untuk menilai tingkat kesehatan atau kinerja BPRS sebagai salah satu bentuk LKM dapat juga dilakukan dengan menggunakan metode PEARLS atau

Performance Indicators (PI)[5]. Berbeda dengan CAMEL yang diciptakan oleh sistem pengawasan eksternal, PEARLS *(Protection, Effective Financial Structure, Asset Quality, Rates of return and Cost, Liquidy dan Sign of Growth)* pada awalnya merupakan alat manajemen intern untuk menilai kinerja lembaga perkreditan *(Credit Union)* yang kemudian banyak dipergunakan untuk pengawasan oleh institusi eksternal. Penilaian PEARLS seluruhnya bersifat obyektif karena membandingkan antara pencapaian dengan standar ataupun target yang telah ditetapkan. Metode ini dinilai kurang begitu tepat dipergunakan untuk mengukur kinerja LKM yang basis pendanaannya dari pihak ketiga berupa tabungan dan deposito, sedangkan lembaga perkreditan bersumber dari donor dalam bentuk hibah maupun berupa setoran modal pemegang saham. Untuk penilaian kinerja LKM jenis C seperti BPRS lebih banyak menggunakan metode PI dibandingkan dengan metode PEARLS.

Ledgerwood menyatakan bahwa terdapat 6 area yang dapat dijadikan indikator kinerja *(Performance Indicators)* LKM, yaitu: Kualitas Portofolio (*Portfolio Quality),* Produktivitas dan efisiensi *(Productivity and Efficiency),* Kemampuan Finansial *(Financial Viability),* Kemampulabaan *(Profitability),* Kecukupan modal *(Leverage and Capital Adequacy),* dan Cakupan Operasional *(Scale, outreach, and growth).* Kelebihan metode PI karena memasukkan unsur kemampuan mengelola biaya-biaya serta manajemen aset portofolio, tingkat keuntungan baik dengan menggunakan dana sendiri maupun dana pihak ketiga, serta kemampuan bank mengatasi gejolak inflasi yang pada umumnya dijadikan sebagai patokan investor. Terakhir adalah adanya rasio yang mengukur kemampuan modal LKM untuk menyerap kerugian.

Performance Indicators

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menilai kinerja BPRS di Indonesia, dalam penelitian ini akan digunakan metode PI. Menurut metode PI terdapat enam indikator untuk menilai kinerja BPRS yaitu: (1) kualitas portofolio (*Portfolio Quality*), (2) produktivitas dan efisiensi (*Productivity and Efficiency Ratios*), (3) kemampuan finansial (*Financial Viability*), (4) Kemampulabaan (*Profitability Ratios*), (5) Kecukupan modal (*Leverage and Capital Adequacy*), dan (6) Cakupan Operasional (*Outreach and Networking*).

Keenam indikator di atas sebagian besar dalam bentuk rasio, yaitu perbandingan antara suatu data keuangan dengan data keuangan atau data lainnya. Analisis *trend* dapat diperoleh dengan membandingkan rasio-rasio tersebut dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diperoleh gambaran apakah kinerja keuangan suatu BPRS mengalami peningkatan atau kemunduran. Selain itu rasio-rasio tersebut harus dianalisa secara komprehensif untuk

5 Ledgerwood, Joanna, Microfinance Handbook, World Bank, 1999.

mendapatkan kinerja keuangan yang utuh dari sebuah BPRS. Berikut ini penjelasan dari masing-masing indikator:

1. Kualitas Portofolio

   Rasio Kualitas Portofolio (KP) menyediakan informasi mengenai persentase aset-aset yang tidak produktif akibat adanya pembiayaan yang non lancar, yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan operasional dan likuiditas. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen untuk mengelola aktiva produktif secara hati-hati dan kebijakan manajemen dalam mengurangi kerugian yang diakibatkan kredit macet dengan cara melakukan penghapusbukuan. Rasio KP terdiri dari tiga rasio yaitu: *On-time Repayments Rates, Porfolio Quality Ratios, dan Loan Loss Ratios.*

   a. On-time Repayment Rate

      On-time Repayment Rate (OtRR) bertujuan untuk memonitor perkembangan tingkat pengembalian selama jangka waktu tertentu dan memprediksikan *cash flow* ke depan. Adapun rumus untuk menghitung OtRR adalah sebagai berikut:

$$\textbf{OtRR} = \frac{\textbf{realisasi angsuran PYD}}{\textbf{tagihan angsuran PYD}}$$

      Data yang digunakan untuk menghitung OtRR diambil dari data 25 debitur terbesar berdasarkan pembiayaan yang diberikan (PYD) per Desember 2000 dari setiap BPRS. Data yang digunakan adalah data tagihan dan realisasi angsuran PYD per bulan selama tahun 2001.

   b. Portfolio Quality Ratios

      Portfolio Quality Ratios bertujuan untuk menilai kualitas portofolio PYD dari BPRS. Rasio PQR terdiri dari dua rasio yaitu *Portfolio at Risk* dan *Delinquent Borrowers.*

      - Portfolio at Risk

        Portfolio at Risk (PaR) adalah salah satu jenis PQR yang konservatif untuk menghitung risiko. Rasio ini menunjukkan total PYD yang melewati batas waktu jatuh temponya (non lancar) atau dengan kata lain PYD yang tergolong dalam kolektibilitas 2, 3, dan 4. Rasio ini sama dengan rasio NPL (*Non Performing Loan*) dalam aspek KAP pada metode CAMEL.

$$\text{PaR} = \frac{\text{PYD non lancar}}{\text{Total PYD}}$$

Rasio PaR yang semakin menurun dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa BPRS tersebut menuju ke arah yang lebih baik. Sebaliknya jika rasio PaR semakin meningkat dari tahun ke tahun maka hal ini menunjukkan bahwa BPRS tersebut mengalami masalah *delinquency* yang cukup serius.

Selain itu, rasio PaR dipengaruhi oleh kebijakan penghapusbukuan suatu BPRS. Jika ada pembiayaan yang sepertinya tidak akan dibayar namun tidak dihapusbukukan oleh BPRS maka rasio PaR BPRS tersebut akan lebih tinggi dibandingkan jika BPRS tersebut menghapusbukukan pembiayaan itu. Namun jika penghapusbukuan pembiayaan dilakukan dengan tergesa-gesa maka rasio PaR (seakan-akan) terlihat rendah dan BPRS tersebut dinilai cukup baik. Oleh karena itu harus dilihat pula nilai PPAP di neraca. Bila nilai PPAP cukup besar (untuk menghapusbukukan pembiayaan) maka hal ini mencerminkan biaya yang tinggi untuk pembiayaan yang dihapusbukukan.

- Delinquent Borrowers

  Informasi yang lebih jauh terhadap kualitas portofolio dapat diperoleh dengan menetapkan jumlah nasabah penerima pembiayaan yang bermasalah (*delinquent)* relatif terhadap volume pembiayaan yang bermasalah (*delinquent*). Dengan informasi ini dapat diperoleh keterangan apakah pembiayaan yang lebih besar atau lebih kecil menghasilkan lebih banyak *delinquency*. Bila *Delinquent Borrowers* (DB) lebih kecil daripada PaR maka pembiayaan berskala besar lebih berpotensi untuk mempunyai masalah *delinquency* dibandingkan pembiayaan berskala kecil.

$$\text{DB} = \frac{\text{Jumlah nasabah pembiayaan kolektibilitas 2,3, dan 4}}{\text{Total jumlah nasabah pembiayaan}}$$

c. Loan Loss Ratios

Loan Loss Ratios bertujuan untuk memberikan indikasi perkiraan PYD yang akan macet dan aktual PYD yang macet. LLRs terdiri dari dua rasio yaitu *Loan Loss Reserve Ratio* dan *Loan Loss Ratio*.

- Loan Loss Reserve Ratio

Loan Loss Reserve Ratio (LLRR) menunjukkan berapa persentase dari portofolio pembiayaan telah disiapkan untuk menutup kemungkinan kerugian dari PYD. Dengan membandingkan rasio ini dalam kurun waktu tertentu dapat dilihat seberapa baik BPRS tersebut mengelola *delinquency*. Rasio ini seharusnya menurun seiring dengan perbaikan yang dilakukan BPRS dalam manajemen *delinquency*-nya. Tentu saja hal ini bisa berlaku jika PPAP yang dibentuk oleh bank sesuai dengan PPAPWD-nya. LKM yang sukses biasanya mempunyai nilai LLRR lebih kecil dari 5%.

$$\textbf{LLRR} = \frac{\textbf{PPAP}}{\textbf{PYD}}$$

- Loan Loss Ratio

Loan loss ratio (LLR) digunakan untuk menentukan tingkat pembiayaan yang dihapusbukukan dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). LLR biasanya jarang lebih besar daripada LLRR karena beberapa pembiayaan yang telah disiapkan PPAP-nya pada gilirannya telah dibayar dan PPAP itu sendiri biasanya lebih besar daripada pembiayaan yang dihapusbukukan. LLR dapat dibandingkan dengan nilai PPAP untuk menentukan jika PPAP tersebut mencukupi berdasarkan pengalaman penghapusbukuan terdahulu. LLR yang tinggi dapat mengakibatkan LLRR yang rendah karena pembiayaan yang dihapusbukukan akan mengurangi PPAP. Jika pembiayaan yang dihapus-bukukan lebih besar dari 2% setiap tahunnya, mengindikasikan adanya masalah *delinquency*. Namun hal ini juga belum tentu benar tergantung kebijakan penghapusbukuan BPRS tersebut.

$$\textbf{LLR} = \frac{\textbf{Pembiayaan yang dihapusbukukan}}{\textbf{PYD}}$$

Jika LLR tinggi tetapi PaR rendah maka BPRS tersebut cenderung mempunyai masalah *delinquency*.

2. Produktivitas dan Efisiensi

Rasio produktivitas dan efisiensi memberikan indikasi mengenai kemampuan BPRS

dalam menghasilkan penerimaan untuk menutupi pengeluaran-pengeluarannya. Dengan menghitung dan membandingkan rasio produktivitas dan efisiensi selama periode tertentu, dapat terlihat maksimalisasi penggunaan aset-aset BPRS. Rasio produktivitas meliputi *Average number of active loans per credit officer*, dan *Average portfolio outstanding per credit officer*, sedangkan rasio efisiensi meliputi *Operating Cost Ratio* dan *Salaies and benefit to portolio outstading*.

a. Rasio Produktivitas

Rasio produktivitas lebih difokuskan pada produktivitas *Credit Officer* (CO) karena merekalah yang merupakan ujung tombak dalam peningkatan penerimaan. Sedangkan pembiayaan merupakan aktiva produktif yang paling dominan bagi BPRS. Terdapat dua rasio yang dipergunakan mengukur produktivitas BPRS yaitu *Average number of active loans per credit officer* dan *Average portfolio outstanding per credit officer*.

- *Average number of active loans per credit officer*

Average number of active loans per credit officer (NLCO) diperoleh dengan membagi total nasabah pembiayaan dengan total CO pada periode tertentu. Setiap CO mempunyai jumlah nasabah optimal yang berbeda-beda untuk dapat dilayani secara efektif. Selain itu ada hubungan antara biaya administrasi (gaji) dengan pembiayaan yang dihapusbukukan. Jika jumlah nasabah banyak, sementara gaji rendah maka cenderung akan mengakibatkan pembiayaan yang dihapusbukukan yang tinggi. Biaya untuk penghapusbukuan ini kadang-kadang lebih besar dibandingkan biaya yang diperlukan untuk menaikkan gaji pegawai. Yang perlu diperhatikan pula adalah rata-rata jangka waktu pembiayaan karena hal ini sangat mempengaruhi jumlah nasabah yang bisa dilayani oleh seorang CO. Jika jangka waktu pembiayaan relatif panjang maka tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk memproses pembiayaan yang baru. Sehingga semakin pendek rata-rata jangka waktu PYD maka akan semakin sedikit nasabah yang bisa dilayani oleh CO. Formula NLCO sebagai berikut:

$$\textbf{NLCO} = \frac{\textbf{Jumlah nasabah}}{\textbf{Jumlah CO}}$$

Average portfolio outstanding per credit officer .

Average portfolio outstanding per credit officer (LCO) diperoleh dengan cara membandingkan total PYD dengan total CO pada periode tertentu. Jumlah PYD

yang dikelola oleh seorang CO akan dipengaruhi oleh jumlah nasabah pembiayaan, kebijakan jumlah pembiayaan maksimum yang dapat diberikan kepada seorang nasabah seperti BMPK (batas maksimum pemberian kredit), jenis pembiayaan, lokasi nasabah dan lain sebagainya. Formula LCO adalah sebagai berikut:

$$\text{LCO} = \frac{\text{PYD}}{\text{CO}}$$

Rasio NLCO dan LCO yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan produktivitas CO yang semakin meningkat.

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio untuk mengukur biaya yang diperlukan dalam menyediakan jasa (pembiayaan) untuk menghasilkan penerimaan. Rasio efisiensi terdiri dari 2 rasio yaitu *Operating Cost Ratio* dan *Salaries and benefit to portolio outstanding.*

- *Operating Cost Ratio*

Operating Cost Ratio (OCR) diperoleh dengan cara membandingkan total biaya operasional dengan PYD pada periode tertentu. LKM yang sukses umumnya mempunyai OCR antara 13 sampai 21 persen dari rata-rata PYD. Rasio ini tergantung pada rata-rata PYD per nasabah (*loan size*). Semakin besar PYD per nasabah maka semakin kecil OCR. Berikut ini formula OCR.

$$\text{OCR} = \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{PYD}}$$

- *Salaries and benefits to portfolio outstanding*

Karena biaya operasional biasanya didominasi oleh biaya tenaga kerja maka sebagai salah indikator efisiensi digunakan rasio SLR. *Salaries and benefits to portfolio outstanding* (SLR) diperoleh dengan membagi total biaya upah dan gaji dengan PYD pada periode tertentu. LKM yang sukses pada umumnya mempunyai sl antara 4 sampai 16 persen dari rata-rata PYD. Namun biaya ini bervariasi antara lain tergantung dari kepadatan penduduk dan tingkat upah minimum di suatu negara (UMR). Formula SLR adalah sebagai berikut:

Penurunan rasio OCR dan SLR suatu BPRS menunjukkan semakin meningkatnya efisiensi dari BPRS tersebut.

$$\textbf{SLR} = \frac{\textbf{Biaya tenaga kerja}}{\textbf{P Y D}}$$

3. Kemampuan Finansial

Kemampuan finansial mencerminkan kemampuan BPRS untuk menutupi biaya-biayanya dengan pendapatan yang diterimanya. Penerimaan dihasilkan ketika aset BPRS diinvestasikan atau digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Sedangkan biaya muncul untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Biaya yang mungkin muncul dalam sebuah BPRS dapat terdiri dari empat kelompok yaitu biaya finansial, biaya PPAP, biaya operasional dan cost of capital. Rasio kemampuan finansial terdiri dari dua rasio yaitu *Spread* dan *Self Sufficiency* yang meliputi *operating self-sufficiency* dan *financial self-sufficiency*.

a. Spread

Spread memperlihatkan perbedaan antara penerimaan yang diperoleh dari portofolio pembiayaan dengan rata-rata biaya untuk memperoleh dana. Semakin besar *spread* memberikan kemungkinan bagi BPRS untuk memperoleh keuntungan. Namun demikian tidak menjadi jaminan besarnya *spread* akan memberikan keuntungan. Hal tersebut juga tergantung kepada kualitas PYD. Jika BPRS memiliki PaR yang besar maka kemungkinan besar akan menderita kerugian. Formula spread adalah sebagai berikut:

$$\textbf{Spread} = \frac{\textbf{Pendapatan Operasional - Biaya Financial}}{\textbf{P Y D}}$$

b. Self Sufficiency

Self-sufficiency adalah kemampuan suatu lembaga keuangan untuk menutup biaya-biaya operasional maupun non operasional dari aktivitas yang menghasilkan *revenue*. Terdapat dua level *self-sufficiency*, yaitu level pertama berupa *operational self sufficiency* dan level kedua berupa *financial self sufficiency*. Tentunya BPRS yang mampu mencapai level kedua lebih baik dari level pertama.

- Operational Self Sufficiency

Operational self sufficiency (OSS) akan memberikan indikator apakah pendapatan yang diperoleh dapat menutup biaya-biaya langsung *(direct cost)* yang meliputi biaya finansial, biaya PPAP, dan biaya operasional. Jika OSS BPRS tidak mencapai 100% maka diperkirakan modalnya akan semakin berkurang karena kerugian. Implikasi selanjutnya adalah semakin kecilnya dana yang dapat diinvestasikan kepada nasabah pembiayaan. Hingga suatu saat akan membawa BPRS kepada kebangkrutan ketika semua dana telah habis. Untuk meningkatkan OSS dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan atau mengurangi pengeluaran. Formula OSS adalah sebagai berikut:

$$\textbf{OSS} = \frac{\textbf{Pendapatan Operasional}}{\textbf{Biaya Langsung = (biaya finansial + biaya PPAP+ biaya operasional)}}$$

- Financial Self Sufficiency

Financial self sufficiency (FSS) akan memberikan indikator apakah pendapatan yang diperoleh dapat menutup biaya-biaya operasional *(direct cost)* dan biaya-biaya non operasional (*indirect cost*) yaitu *Cost of Capital* (*CoC*)[6]. FSS diperoleh dengan membagi pendapatan operasional dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Formula FSS adalah sebagai berikut:

$$\textbf{FSS} = \frac{\textbf{Pendapatan Operasional}}{\textbf{Biaya finansial + biaya PPAP + biaya operasional + CoC}}$$

4. Kemampulabaan

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan BPRS yang dikaitkan dengan struktur neracanya. Rasio-rasio tersebut meliputi *Return on Assets*, *Return on Business*, dan *Return on Equity* dengan formula sebagai berikut:

a. Return on Assets

Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan bank untuk memanfaatkan seluruh asetnya untuk memperoleh keuntungan. Rasio ini dipengaruhi oleh faktor

6 CoC dipertimbangkan sebagai biaya untuk menjaga nilai modal dari inflasi dan biaya untuk mendapatkan *liabilities*. Formula dari CoC = [(tingkat inflasi x (rata-rata modal - rata-rata Aktiva Tetap dan Inventaris)] + [(rata-rata *liabilities* x suku bunga pasar) – biaya finansial].

antara lain jangka waktu PYD dan tingkat imbalan marjin / bagi hasil. LKM yang sukses biasanya mempunyai ROA di atas 7,4%. ROA diperoleh dengan cara mambagi laba / rugi operasional dibagi dengan total asset pada periode tertentu. Formula ROA adalah sebagai berikut:

$$\textbf{ROA} = \frac{\textbf{Laba rugi operasional}}{\textbf{Aset}}$$

b. Return on Business

Return on Business (ROB) dipergunakan mengingat bahwa kegiatan utama BPRS selain melakukan investasi / pembiayaan juga menghimpun dana berupa tabungan dan deposito. Sebagai lembaga intermediasi yang memberikan pembiayaan dengan dana yang sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga, maka rasio ROB lebih cocok dibandingkan ROA. Hal ini disebabkan karena ketika BPRS menghimpun dana dari masyarakat maka BPRS tersebut akan membayar bagi hasil kepada nasabah dana. Jika hanya ROA yang dipertimbangkan maka BPRS yang memobilisasi dana masyarakat akan dirugikan karena kenaikan biaya-biaya operasional mereka. Jika ROB BPRS lebih kecil daripada ROA-nya maka BPRS tersebut harus mempertimbangkan apakah masih menguntungkan untuk memobilisasi dana masyarakat. ROB diperoleh dengan cara membagi Laba / rugi operasional dibagi dengan *business base. Business base* diperoleh dengan cara aset ditambah dengan kewajiban kepada pihak ketiga dan selanjutnya dibagi dua. Formula ROB adalah sebagai berikut:

$$\textbf{ROB} = \frac{\textbf{Laba rugi operasional}}{\textbf{Business base}}$$

c. Return on Equity

Return on Equity (ROE) memberikan informasi bagi pemilik modal mengenai keuntungan BPRS dari modal yang telah diinvestasikan. Jika ROE lebih kecil daripada tingkat inflasi maka modal akan berkurang setiap tahun. ROE dipengaruhi oleh struktur aset. Jika aset BPRS didanai lebih banyak oleh modal maka nilai ROE akan lebih rendah dibandingkan jika aset BPRS didanai lebih banyak oleh *liabilities*. Rasio ini akan sangat berguna jika BPRS ingin mencari investor baru. ROE diperoleh

dengan cara membagi laba / rugi operasional dengan rata-rata modal pada periode tertentu. Formula ROE sebagai berikut:

$$\textbf{ROE} = \frac{\textbf{Laba rugi operasional}}{\textbf{Rata-rata modal}}$$

5. Kecukupan Modal

Kecukupan modal terdiri dari dua rasio yaitu *Leverage* dan *Capital Adequacy*. Kedua rasio tersebut akan mengukur manajemen liabilities BPRS dengan mengkombinasikan antara penggunaan dana pihak ketiga untuk meningkatkan keuntungan dengan kemampuan untuk menjaga kecukupan modal dalam fungsinya untuk menyerap kerugian.

a. Leverage

Leverage adalah membandingkan antara kewajiban kepada pihak ketiga dengan modal. Mengingat modal adalah terbatas maka BPRS berusaha untuk meningkatkan sumber-sumber dana dari luar dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan. Pada umumnya jika leverage meningkat dari tahun ke tahun maka ROE-nya juga akan meningkat. Tetapi jika OC dan PPAP / PYD lebih besar dari 15% maka disarankan untuk tidak meningkatkan liabilities. Hal ini disebabkan karena untuk meningkatkan liabilities harus dipertimbangkan pula kemampuan untuk membayar kembali.

$$\textbf{Leverage} = \frac{\textbf{Liabilities}}{\textbf{Modal}}$$

b. Capital Adequacy

Capital Adequacy Ratio (CAR) mencerminkan tingkat capital yang cukup untuk menyerap potensial kerugian selain mempersiapkan *financial sustainability*. Tujuan dari menghitung rasio ini adalah untuk memastikan tingkat solvabilitas dari suatu BPRS. CAR diperoleh dengan membagi modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Perhitungan ATMR adalah sebagai berikut 0% untuk kas dan 100% untuk PYD dan Aktiva Tetap dan Inventaris (ATI). Jika suatu BPRS sedang

berkembang maka biasanya ditandai dengan peningkatan leverage dan penurunan CAR.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Capital *}}{\text{PYD + ATI}}$$

* Capital = Modal + Cadangan + Laba / Rugi Tahun lalu + (0.5 Laba / Rugi Tahun Berjalan)

Mengingat karakteristik risiko yang harus dikelola BPRS lebih besar dari bank umum maka standar BIS yaitu CAR minimum 8% adalah tidak memadai bagi BPRS. Beberapa pakar LKM mengusulkan minimal dua kali dari CAR minimum BIS atau bahkan dengan mengacu kepada CAR industri LKM.

Berikut ini beberapa karakteristik risiko BPRS sebagai LKM dibandingkan dengan bank umum:

– Karakteristik nasabah BPRS rentan terhadap perubahan lingkungan menyebabkan relatif tingginya kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan nasabah bank umum. Hal tersebut juga diperburuk dengan pengikatan jaminan yang pada umumnya lemah secara hukum.

– BPRS beroperasi dengan biaya administrasi dan biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum, sehingga pada umumnya untuk menutup biaya-biaya tersebut diperlukan spread yang tinggi. Karena jumlah nasabah yang dilayani jauh lebih kecil dibandingkan bank umum maka sedikit saja timbul pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi likuiditas dan kemampulabaan BPRS.

– Sebagian besar LKM sebagaimana BPRS memiliki keterbatasan dalam penambahan modal disetor. Terlebih untuk kebutuhan dana yang bersifat jangka pendek. Hal tersebut karena rata-rata BPRS dimiliki oleh individual atau kelompok yang memiliki keterbatasan sumber dana serta lemahnya akses kepada sumber-sumber dana.

Secara umum risiko-risiko yang harus dikelola oleh BPRS meliputi balance sheet structure risk, profitability risk, solvency / capital adequacy risk, investment risk, liquidity risk, dan operational risk.

6. Cakupan Operasional

Cakupan operasional adalah untuk melihat tingkat keluasan jangkauan BPRS dalam melayani nasabahnya. Sebagai LKM salah satu misi BPRS adalah melayani sebanyak dan seluas mungkin masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank umum. Dengan demikian semakin banyak dan luas nasabah yang dilayani menunjukan bahwa BPRS tersebut dapat menjalankan misinya tersebut dengan baik. Jangkauan operasional ini dilihat dari tiga aspek yaitu kelompok nasabah dan staf BPRS, penyebaran pembiayaan, dan penyebaran penghimpunan dana.

a. Kelompok Nasabah dan Staf BPRS.

Analisa dalam kelompok ini adalah untuk: (a) melihat komposisi nasabah wanita baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana BPRS. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa wanita adalah kelompok masyarakat yang kurang mendapat akses kepada sektor formal khususnya di bidang keuangan dan perbankan dibandingkan pria. Sehingga keberadaan LKM sebagaimana BPRS diharapkan mampu membesarkan peluang wanita untuk mendapatkan akses di bidang keuangan dan perbankan baik sebagai penabung maupun penerima pembiayaan; (b) melihat kemampuan BPRS menyerap tenaga kerja dengan cara membandingkan jumlah SDM BPRS dengan rata-rata SDM industri BPRS; dan (c) melihat kemampuan menjalankan fungsi intermediasi yaitu dengan cara membandingkan nilai dana pihak ketiga dengan PYD pada periode tertentu.

b. Penyebaran Pembiayaan

Penyebaran pembiayaan BPRS dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah nasabah PYD, rata-rata PYD dengan industri. Pertumbuhan PYD dalam tga tahun terakhir juga dapat dibandingkan dengan pertumbuhan PYD industri. Keluasan cakupan pembiayaan juga dapat terlihat dari jumlah pembiayaan minimum, rata-rata dan maksimum untuk setiap nasabah, jangka waktu PYD per nasabah dibandingkan dengan rata-rata industri.

c. Penyebaran penghimpunan dana

Penyebaran penghimpunan dana adalah untuk menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank umum juga memiliki kemampuan untuk menabung. Semakin banyak penabung dan deposan adalah indikator kinerja BPRS sebagai LKM. Penyebaran penghimpunan dana dapat dilihat dari rata-rata tabungan dan deposito dibagi dengan PYD, rata-rata jumlah penabung per BPRS dibandingkan dengan industri.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini dilakukan penilaian kinerja BPRS dengan menggunakan metode PI. Selanjutnya hasil penilaian tersebut dibandingkan dengan hasil penilaian dengan menggunakan sistem penilaian tingkat kesehatan yang sekarang ada yaitu metode CAMEL. Dari hasil pembandingan tersebut akan diketahui tingkat konsistensi metode PI terhadap metode CAMEL. Secara grafis, kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan, diilustrasikan dalam gambar berikut:

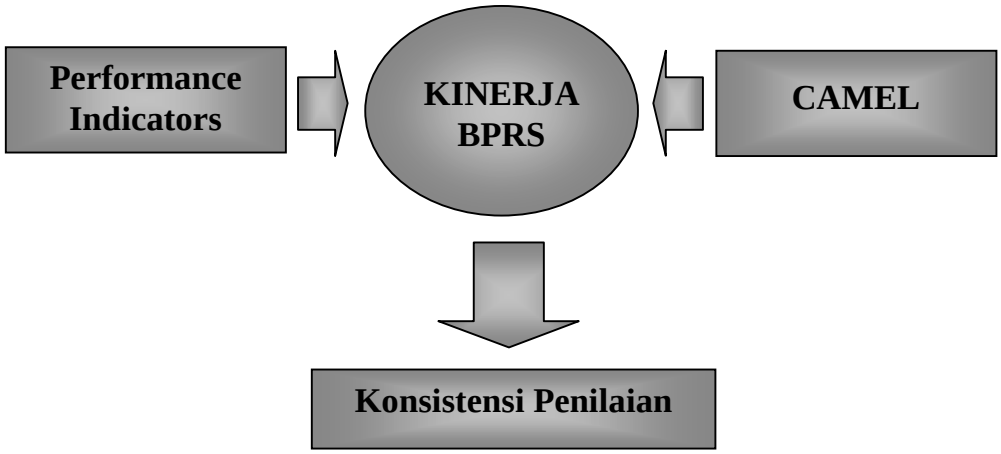

Untuk membandingkan kinerja BPRS antara hasil penilaian dengan menggunakan metode CAMEL dan PI, terlebih dahulu dilakukan pengelompokkan pada masing-masing hasil penilaian sebagai berikut:

- Nilai akhir PI setiap BPRS dikelompokkan menjadi dua yaitu 1 dan 0. Kelompok nilai 1 apabila nilai akhir PI BPRS adalah lebih besar dari 0.66[7] dengan nilai maksimum 1 (sempurna). Sedangkan untuk nilai akhir PI BPRS antara 0 s.d. 0.66 dimasukkan ke dalam kelompok nilai 0.
- Selanjutnya hasil akhir penilaian TKS BPRS (metode CAMEL) juga dikelompokkan menjadi dua yaitu nilai 1 dan 0. Kelompok nilai 1 apabila nilai akhir TKS BPRS adalah 1 s.d. 2.5. Sedangkan untuk nilai akhir TKS BPRS di atas 2.5 dimasukkan ke dalam kelompok nilai 0.

7 0.66 adalah nilai maksimum untuk TKS bank dengan predikat "Kurang Sehat".

- Tahapan berikutnya adalah membandingkan kelompok nilai PI dengan kelompok nilai CAMEL untuk masing-masing BPRS. Dengan membandingkan kedua kelompok nilai tersebut akan terlihat tingkat konsistensi metode PI terhadap metode CAMEL.
- Tahapan selanjutnya adalah melihat unsur-unsur dalam masing-masing metode yang memberikan kontribusi signifikan dalam penilaian akhir kinerja BPRS.

Metode Analisis

Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan (1) statistika deskripsi dan (2) analisis kuantitatif yaitu korelasi linear. Analisis dilakukan setelah terlebih dahulu melalui proses pengkodean *(coding)*, verifikasi, dan pengeditan, sehingga keakuratan data lebih dapat diandalkan dan mudah dianalisis. Program olah data yang digunakan adalah SPSS.

1. Statistika Deskriptif

   Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna (Walpole, 1993)[8]. Analisis ini meliputi penyusunan ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, tabel, diagram, dan grafik.

2. Korelasi Linear

   Tujuan analisis korelasi adalah untuk mengetahui apakah di antara dua variabel (misalnya X dan Y) terdapat hubungan, dan jika ada hubungan, bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut (Singgih Santoso, 2001)[9]. Ada dua hal dalam penafsiran korelasi, yaitu tanda + atau – yang berhubungan dengan arah korelasi, serta kuat tidaknya korelasi.Tanda + menunjukkan bahwa arah korelasi positif, atau semakin besar X maka Y cenderung semakin besar, dan sebaliknya. Besar korelasi > 0,5, berarti X berkorelasi kuat dengan Y.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari BPRS dalam bentuk data isian sesuai formulir yang disampaikan. Data sekunder meliputi data keuangan antara lain Laporan Bulanan BPRS dan Laporan Tingkat Kesehatan BPRS selama tiga tahun terakhir (Desember1999 – Desember 2001). Data tersebut diperoleh dari intern BI seperti pengawas BPRS di KBI, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Direktorat Pengawasan BPR, dan Tim Pengawasan Bank Syariah-BPS.

8 Walpole, Ronald E., Pengantar Statistika Edisi ke-3, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal.2
9 Santoso, Singgih, Buku Latihan SPSS Statitik Parametrik, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hal. 149

Jumlah BPRS yang dijadikan obyek penelitian sebanyak 82 BPRS yaitu data seluruh BPRS di Indonesia per April 2002. Dari ke-82 BPRS tersebut, 15 diantaranya tidak dapat dijadikan responden karena beberapa masalah, misalnya BPRS secara teknis tidak beroperasi lagi atau berdiri setelah tahun 2001.

Teknik Penarikan Sample dan Pengumpulan Data

Data kinerja BPRS diperoleh dari seluruh BPRS yang ada di Indonesia per bulan April 2002 (82 BPRS). Untuk memverifikasi data tersebut dilakukan pengamatan langsung terhadap 32 BPRS dengan metode pengambilan *sample* secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu di wilayah kerja KBI yang memiliki 4 atau lebih BPRS. Namun demikian dengan mempertimbangkan beberapa faktor teknis, terdapat beberapa daerah yang digabung dengan wilayah lainnya atau tidak dijadikan wilayah *sample* meskipun memenuhi kriteria karena pertimbangan faktor keamanan, seperti BPRS di wilayah NAD.

Secara teknis pelaksanaan pengumpulan data ini dilakukan antara lain melalui surat menyurat dan kunjungan langsung ke responden. Kegiatan kunjungan ini melibatkan pegawai kantor pusat (Biro Perbankan Syariah) dan pegawai KBI.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap 82 BPRS yang tersebar di 18 propinsi atau 25 wilayah kerja KBI. Penelitian lapangan dilakukan di wilayah kerja KP BI dan 7 KBI dengan jumlah sampel 32 BPRS. Meskipun wilayah kerja KBI Banda Aceh memiliki lebih dari 4 BPRS, namun karena pertimbangan keamanan maka tidak dijadikan sampel. Adapun wilayah kerja KBI Surabaya, Semarang dan Yogyakarta yang memiliki BPRS kurang dari 4 dijadikan sampel karena lokasinya berdekatan satu sama lain. Dengan demikian wilayah kerja yang dikunjungi adalah KBI Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makassar dan KPBI. Pelaksanaan penelitian dimulai sejak bulan Januari 2002 dan berakhir pada bulan November 2002.

INDIKATOR KINERJA BPR SYARIAH

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab III, dalam penelitian ini indikator kinerja BPRS di Indonesia akan diukur dengan menggunakan metode PI yang terdiri dari 6 indikator ukuran kinerja yaitu (1) kualitas portofolio *(Portfolio Quality)*, (2) produktivitas dan efisiensi *(Productivity and Efficiency Ratios)*, (3) kemampuan finansial *(Financial Viability)*, (4) Kemampulabaan *(Profitability Ratios)*, (5) kecukupan modal *(Leverage and Capital Adequacy)*,

dan (6) cakupan operasional *(Outreach and Networking).* Dalam Bab IV ini dibahas hasil kinerja BPRS dengan menggunakan metode PI. Pada bagian terakhir dilakukan perbandingan antara kinerja BPRS dengan menggunakan metode PI dan CAMEL.

Penilaian Kinerja BPRS Dengan Metode PI

Kualitas Portofolio

Kualitas Portofolio menggambarkan persentase dari aset-aset yang tidak produktif dan hubungannya dengan Pendapatan Operasional. Ada lima rasio yang digunakan untuk mengukur Kualitas Portofolio yaitu: *(i) On-time Repayment Rate (OtRR), (ii) Portfolio at Risk (PaR), (iii) Delinquent Borrowers (DB), (iv) Loan Loss Reserve Ratio (LLRR),* dan *(v) Loan Loss Ratio (LLR).*

(i). On-time Repayment Rate

Data yang digunakan untuk mengukur OtRR berasal dari data 25 debitur terbesar berdasarkan PYD per Desember 2000 dari masing-masing BPRS. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata OtRR BPRS secara nasional adalah 71,70%. Hal ini berarti bahwa rata-rata dari seluruh tagihan angsuran per bulan BPRS di Indonesia, hanya 71,70% yang terealisasi.

Jika digunakan nilai 5% sebagai batas yang dapat diterima akan adanya nasabah yang telah jatuh tempo namun belum memenuhi kewajibannya, maka terdapat 17 BPRS atau 27.86% yang memiliki OtRR 95% sampai dengan 100%. Dengan demikian terdapat 72.14% BPRS yang nilai OtRR-nya di bawah 95%. Konsentrasi BPRS dengan OtRR yang rendah ada di wilayah Jabotabek, Jawa Barat dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Mengingat lokasi BPRS terpusat pada wilayah Jabotabek dan Jawa Barat, maka dapat dikatakan bahwa rendahnya nilai OtRR nasional lebih banyak dipengaruhi oleh rendahnya nilai OtRR BPRS di kedua wilayah ini. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1. Rata-rata OtRR BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	2001
Nasional	0.7170
Sumatera	0.8222
Jabotabek	0.6670
Jawa Barat	0.6386
Jawa Tengah dan DIY	0.9592
Jawa Timur	0.8143
KTI	0.5237

Mengingat pangsa pembiayaan untuk 25 debitur terbesar rata-rata mencakup 36% dari total pembiayaan untuk seluruh nasabah BPRS, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah potensial pada sebagian besar BPRS. Hal ini memberikan konsekuensi bagi BPRS untuk menyediakan aktiva lancar yang lebih besar guna menjaga likuiditasnya agar terhindar dari kemungkinan *mismatch* serta kemungkinan akan menurunnya tingkat keuntungan BPRS akibat dari meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah. Untuk menganalisa pembiayaan bermasalah lebih lanjut digunakan rasio PaR.

(ii). Portfolio at Risk

Rasio PaR lebih dikenal dengan sebutan *Non Performing Loan* (NPL) dalam terminologi perbankan konvensional atau *Non Performing Financing* (NPF) dalam terminologi perbankan syariah yaitu membandingkan antara pembiayaan non lancar dengan total PYD. Rasio PaR BPRS dalam periode 1999 – 2001 ditunjukkan pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2. Rata-rata PaR BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	1999	2000	2001
Nasional	0.2143	0.2004	0.1888
Sumatera	0.1641	0.1755	0.1517
Jabotabek	0.3480	0.3125	0.2438
Jawa Barat	0.1427	0.1416	0.1944
Jawa Tengah dan DIY	0.1366	0.1433	0.1244
Jawa Timur	0.1662	0.1109	0.0848
KTI	0.2235	0.2122	0.2619

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara nasional, rata-rata PaR BPRS di Indonesia dalam tiga tahun periode pengamatan adalah 20.11% dengan kecenderungan semakin menurun. Hal tersebut hampir terjadi pada seluruh regional kecuali untuk wilayah Jawa Barat dan KTI yang justru mengalami peningkatan PaR. Sebenarnya dalam periode pengamatan nilai pembiayaan non lancar meningkat rata-rata 18% namun karena peningkatan ekspansi PYD secara persentase dan nilai lebih besar lagi maka dalam tahun 1999-2001 PaR BPRS mengalami penurunan.

Secara umum perbaikan PaR terjadi karena adanya 53% dari total BPRS yang mengalami penurunan nilai PaR. Namun demikian yang perlu dicatat disini adalah persentase BPRS yang mengalami peningkatan nilai PaR juga relatif banyak yaitu 47%. Apabila dilihat per regional terlihat jumlah BPRS yang mengalami perbaikan PaR dan

peningkatan jumlah pembiayaan non lancar pada masing-masing regional adalah relatif seimbang. Untuk wilayah Sumatera, Jabotabek dan KTI komposisi jumlah BPRS yang mengalami perbaikan PaR lebih banyak dari BPRS yang meningkat pembiayaan non lancarnya. Meskipun cukup banyak BPRS yang mengalami perbaikan PaR, namun untuk wilayah KTI rata-rata PaR-nya justru mengalami peningkatan. Hal tersebut dimungkinkan karena nilai perbaikan PaR di regional tersebut lebih kecil dari peningkatan pembiayan non lancarnya meskipun dari jumlah BPRS yang lebih sedikit.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara industri terdapat kecenderungan perbaikan PaR BPRS. Namun jika dibandingkan dengan standar internasional yaitu maksimum 5%, maka jelas bahwa PaR BPRS jauh di atas batas maksimum tersebut. Sebagai pembanding hasil penelitian Paul B. McGuire terhadap 7 kelompok LKM di Asia (Selatan dan Tenggara) pada tahun 1998 menunjukkan bahwa untuk wilayah tersebut rata-rata PaR-nya sebesar 6.6%[10]. Untuk itu upaya-upaya perbaikan kualitas pembiayaan masih harus lebih diintensifkan lagi.

(iii). Delinquent Borrowers

Jika PaR menyoroti kuantitas pembiayaan non lancar, maka untuk melihat berapa banyak nasabah pembiayaan yang bermasalah dipergunakan rasio DB. Rasio DB dilakukan dengan cara membandingkan jumlah nasabah non lancar dengan total nasabah. Tabel 4.3 berikut ini menggambarkan DB BPRS untuk skala nasional maupun regional.

Tabel 4.3. Rata-rata DB BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	1999	2000	2001
Nasional	0.2802	0.2649	0.2501
Sumatera	0.2143	0.2124	0.1854
Jabotabek	0.5033	0.4174	0.3733
Jawa Barat	0.1389	0.1661	0.2086
Jawa Tengah dan DIY	0.2341	0.1464	0.1384
Jawa Timur	0.2111	0.1611	0.1331
KTI	0.2736	0.3515	0.3348

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara nasional, rata-rata DB BPRS di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3% yaitu dari 28% pada tahun 1999 menjadi 25% pada tahun 2001. Jika dilihat per regional maka tidak semua regional mengalami penurunan DB,

10 McGuire, The MicroBanking Bulletin, July 1998, p.39.

seperti wilayah Jawa Barat dan KTI masing-masing meningkat 7% dan 6%. Pola tersebut juga sejalan dengan PaR untuk regional tersebut yaitu dalam periode pengamatan secara kuantitatif mengalami peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah. Apabila DB dibandingkan dengan PaR, tampak pola rasio DB selalu lebih besar dibandingkan dengan PaR.

Dalam tabel 4.4 di bawah ini terlihat bahwa rata-rata pembiayaan per nasabah dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 menunjukkan peningkatan meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu besar, yaitu dari Rp2,03 juta per nasabah pada tahun 1999 menjadi Rp2,59 juta per nasabah. Angka tersebut masih di bawah angka rata-rata pembiayaan per nasabah untuk 25 nasabah terbesar pada tahun 2001 yaitu sebesar Rp45,28 juta.

Tabel 4.4. Rata-rata PYD per nasabah BPRS di Indonesia

Rp1.000.000,00

REGIONAL	1999	2000	2001
Total PYD	9.702	10.774	13.379
Total Nasabah PYD	4.770	4.933	5.152
Rata-rata PYD per nasabah	2,03	2,18	2,59
Rata-rata PYD per nasabah untuk 25 debitur terbesar			45,28

Mengingat konsistensi rasio PaR yang selalu di bawah DB pada periode pengamatan, kemungkinan besar pembiayaan bermasalah tidak hanya terjadi pada pembiayaan berskala besar namun juga pada pembiayaan berskala kecil. Dengan melakukan uji korelasi antara OtRR dengan DB pada tahun 2001 maka diperoleh hasil -0.33 dengan tingkat keyakinan 90%, yang berarti keduanya memiliki korelasi positif namun tidak terlalu kuat. Hal ini berarti hipotesa Ledgerwood[11] yang menyebutkan bahwa *"If the ratio of DB is lower than PaR, then it is likely that larger loans are more problematic than smaller ones"* tidak terjadi di Indonesia.

Angka-angka perhitungan di atas menunjukkan bahwa terjadi perbaikan rasio PaR dan DB. Hal tersebut memberikan indikasi adanya upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah BPRS.

(iv). Loan Loss Reserve Ratio

Loan Loss Reserve Ratio (LLRR) merupakan salah satu alat untuk melihat berapa besar dana yang dicadangkan oleh bank untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian di masa yang akan datang sebagai akibat pembiayaan yang gagal. Namun apabila *reserve* yang dibentuk tidak mencukupi maka kekurangan sebagai akibat dari penghapusbukuan akan

11 Microfinance Handbook, p.208.

dibebankan kepada laba rugi tahun berjalan. LLRR diperoleh dengan cara membandingkan antara cadangan penghapusan dengan total PYD untuk periode tertentu.

Dalam penilaian tingkat kesehatan (TKS) BPRS yang dilakukan oleh Bank Indonesia, LLRR mirip dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPRS per PYD. PPAP tersebut kemudian dibandingkan dengan PPAP yang wajib dibentuk (PPAPWD)[12]. Dalam hal PPAP lebih kecil dari PPAPWD maka hal tersebut akan menurunkan TKS bank yang bersangkutan yaitu pada unsur Asset Quality dari CAMEL.

Tabel 4.5. di bawah ini menggambarkan LLRR BPRS baik industri maupun regional dan perkembangannya.

Tabel 4.5. Rata-rata LLRR BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	1999	2000	2001
Nasional	0.0437	0.0400	0.0336
Sumatera	0.0482	0.0497	0.0380
Jabotabek	0.0567	0.0418	0.0284
Jawa Barat	0.0258	0.0277	0.0274
Jawa Tengah dan DIY	0.0301	0.0320	0.0487
Jawa Timur	0.0219	0.0172	0.0138
KTI	0.0612	0.0544	0.0523

Dengan membandingkan LLRR Nasional dalam kurun waktu 1999-2001 dapat dilihat bahwa rata-rata LLRR BPRS di Indonesia mengalami penurunan dari 4.73% pada tahun 1999 menjadi 3.36% pada tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan kualitas pembiayaan sebagaimana tampak pada tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6. Perkembangan Kolektibilitas BPRS di Indonesia

Kolektibilitas[13]	1999	2000	2001
1	45%	51%	46%
2	2%	3%	11%
3	11%	8%	4%
4	42%	38%	39%

12 PPAPWD= ((0.5% x Pembiayaan Lancar)+(10% x Pembiayaan Kurang Lancar)+(50% x Pembiayaan Diragukan)+(100%xPembiayaan Macet)). Catatan: nilai pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dalam perhitungan PPAPWD adalah setelah dikurangi dengan nilai jaminan).

13 Penghitungan kolektibilitas BPRS masih mengacu kepada SE BI No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang diperuntukkan bagi BPR konvensional.

Dari tabel di atas terdapat indikasi adanya upaya peningkatan kualitas pembiayaan BPRS. Jika pada tahun 1999 persentase pembiayaan lancar tercatat sebesar 45%, maka pada tahun 2001 meningkat menjadi 46%. Struktur pembiayaan non lancar juga mengalami perbaikan dari 11% dan 42% yang memiliki kolektibilitas 3 (diragukan) dan 4 (macet) pada tahun 1999 menjadi 4% dan 39% pada tahun 2001. Tercatat sebanyak 19% dari BPRS yang dijadikan sampel penelitian mengalami perbaikan kolektibilitas pembiayaannya.

Jika mengacu pada standar internasional *(best practices)* yang memperkenankan batas maksimal LLRR sebesar 5%, maka LLRR BPRS di Indonesia yang berada pada kisaran 3-4% sepintas terlihat cukup baik. Namun angka tersebut kemungkinan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini terlihat pada tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7. Perhitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) dan realisasi Loan Reserve BPRS di Indonesia

Rp1.000,00

		1999	2000	2001
a.	0.5% x Pembiayaan Lancar	252,912.00	372,438.00	480,122.00
b.	(10% x Pembiayaan kategori II,III) x 50%[14]	310,286.71	343,407.54	436,046.96
c.	(50% x Pembiayaan kategori II,III) x 50%	1,551,433.56	1,717,037.69	2,180,234.81
d.	(b+c):2	930,860.14	1,030,222.61	1,308,140.89
e.	(100% x Pembiayaan kategori IV) x 50%	2,361,060.88	2,770,936.13	2,640,615.88
f.	**Perkiraan PPAPWD or LRMBC[15]**	3,544,833.01	4,173,596.74	4,428,878.76
g.	**PPAP or LR**	2,001,240.00	2,601,562.00	2,679,906.00
h.	**Perkiraan kekurangan LRMBC**	1,543,593.01	1,572,034.74	1,748,972.76

Tabel di atas merupakan perhitungan pembentukan LLRR BPRS dan perkiraan LLRR yang wajib dibentuk[16] dengan mengacu pada ketentuan pembentukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang ditetapkan oleh BI. Dari perhitungan tersebut tampak bahwa LLRR BPRS dalam periode 1999-2001 belum dapat memenuhi perkiraan PPAPWD[17], sehingga tampak masih ada kekurangan PPAPWD. Dengan demikian secara umum BPRS belum mampu untuk memenuhi ketentuan KAP.

Sebagaimana kondisi umum BPRS secara nasional maka sebagian besar regional juga mengalami penurunan LLRR kecuali wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah / DIY. Untuk wilayah Jawa Barat peningkatan LLRR pada BPRS berkaitan dengan meningkatnya PaR

14 50% adalah pengurangan PPAP dengan nilai agunan yang diambil secara rata-rata.
15 Loan Loss Reserve Must Be Created (LLRMBC) = Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAPWB).
16 Digunakan perkiraan mengingat data kolektibilitas pembiayaan individual BPRS tidak tersedia.
17 PPAPWD untuk pembiayaan dengan kolektibilitas 1,2,3, dan 4 masing-masing adalah 0.5%,10%,50% dan 100%.

dan DB sedangkan wilayah Jawa Tengah / DIY terjadi sebaliknya yaitu suatu kondisi dimana peningkatan LLRR BPRS diikuti dengan penurunan PaR dan DB.

Di wilayah KTI meningkatnya PaR dan DB diikuti dengan menurunnya LLRR. Kondisi tersebut kemungkinan disabkan oleh beberapa faktor seperti adanya peningkatan secara kuantitas pembiayaanyang berhasil diimbangi dengan keberhasilan meningkatnya kualitas pembiayaan atau di satu segi terdapat peningkatan kuantitas pembiayaan dan debitur bermasalah namun di sisi lain juga terdapat penghapusbukuan pembiayaan yang dikategorikan macet. Dari neraca BPRS yang berada di regional tersebut diketahui adanya peningkatan pembiayaan yang diberikan pada periode 1999-2001 sebesar 65.21%. Ekspansi yang relatif tinggi tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan peningkatan pembiayaan bermasalah karena kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian. Indikator meningkatnya pembiayaan bermasalah juga tampak pada peningkatan LLRR namun tidak sebesar peningkatan ekspansi pembiayaan. Di lain pihak pada periode tersebut juga terdapat penghapusbukuan yang nilainya cukup besar sehingga secara keseluruhan LLRR pada wilayah KTI mengalami penurunan.

(v). Loan Loss Ratio

Penghitungan nilai Loan Loss Ratio (LLR) bertujuan untuk mengetahui nilai penghapusbukuan pembiayaan macet dibandingkan dengan rata-rata PYD pada periode tertentu. Rasio ini memberikan indikasi tentang nilai kerugian yang diderita bank karena pembiayaan macet / kemungkinan besar tidak tertagih. Tabel 4.8 di bawah ini menunjukkan LLR BPRS untuk periode tahun 2000 sampai dengan 2001.

Tabel 4.8. Rata-rata LLR BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	2000	2001
Nasional	0.0149	0.0237
Sumatera	0.0017	0.0173
Jabotabek	0.0143	0.0305
Jawa Barat	0.0104	0.0296
Jawa Tengah dan DIY	0.0057	0.0051
Jawa Timur	0.0853	0.0346
KTI	0.0036	0.0165

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata LLR BPRS di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2000 sampai tahun 2001. Peningkatan LLR mengindikasikan

adanya peningkatan pembiayaan dengan kolektibilitas macet yang sudah tidak mungkin lagi dilakukan penagihan dan adanya upaya perbaikan struktur pembiayaan dengan mengurangi proporsi pembiayaan macet terhadap total PYD. Dalam periode 1999-2001 persentase peningkatan LLR adalah sebesar 200% per tahun.

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bahasan LLRR, bahwa salah satu indikasi penyebab turunnya LLRR adalah adanya peningkatan penghapusbukuan pembiayaan macet. Sumber dana penghapusan berasal dari LLRR yang telah dibentuk atau langsung mengurangi modal jika LR BPRS lebih kecil dari jumlah penghapusannya. Pada satu sisi LLR BPRS meningkat dan pada sisi lain LLRR mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit banyak penghapusbukuan pembiayaan macet memberikan kontribusi pada turunnya kewajiban BPRS untuk membentuk cadangan penghapusan aktiva produktif.

Meskipun peningkatan penghapusan pembiayaan macet akan memperbaiki kualitas PYD BPRS namun apabila perbaikan kualitas PYD didominasi oleh penghapusan pembiayaan macet bukan oleh cara lain seperti restrukturisasi dan pembinaan, dapat memberikan gambaran yang salah mengenai kemampuan BPRS dalam mengelola PYD. Tabel 4.9. di bawah menunjukkan bahwa meskipun secara persentase pertumbuhan penghapusbukuan pembiayaan macet lebih besar dari pertumbuhan PYD namun nilainya sangat kecil. Demikian pula dibandingkan dengan pertumbuhan PYD non lancar. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi penghapusan pembiayaan macet terhadap perbaikan PYD non lancar industri BPRS sangat kecil.

Tabel 4.9. Perkembangan PYD dan Penghapusbukuan Pembiayaan Macet BPRS di Indonesia

Rp1.000,00

	1999	2000	2001	Pertumbuhan rata-rata (1999-2001)
Total Total PYD	61,510,256	86,897,623	110,026,571	34%
PYD dg Kol.2-4	9,702,167	10,774,747	13,379,865	18%
Penghapusbukuan	193,890	846,011	1,388,253	200%

Kesimpulan dari analisa kualitas portofolio adalah dalam tahun 1999-2001 menunjukkan trend membaiknya rasio-rasio kualitas portofolio industri BPRS. Diantara perbaikan portofolio industri BPRS adalah adanya perbaikan struktur pembiayaan yaitu meningkatnya proporsi PYD lancar, menurunnya PYD macet. Berkurangnya PYD macet antara lain adanya tindakan manajemen BPRS untuk menghapusbukuan PYD macet tersebut. Tindakan tersebut juga dilakukan untuk mengurangi beban pembentukan LLR. Keberhasilan BPRS untuk memperbaiki kualitas aktiva produktif khususnya pembiayaan perlu

ditingkatkan lagi mengingat: 1. masih relatif tinggi rasio-rasio kualitas portofolio khususnya PaR dan DB dibandingkan dengan standar internasional, 2. perbaikan rasio kualitas portofolio lebih disebabkan karena tingginya ekspansi PYD, (c) meratanya pembiayaan bermasalah baik untuk skala kecil maupun pada pembiayaan dengan skala besar, (d) terdapat kemungkinan bahwa BPRS juga belum mampu memenuhi ketentuan minimum PPAPWD sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan (e) meskipun dapat mengurangi beban BPRS untuk membentuk LLRR, namun karena nilainya sangat kecil maka peningkatan LLR memberikan kontribusi yang tidak signifikan pada perbaikan kualitas PYD industri BPRS.

Produktivitas dan Efisiensi

Rasio produktivitas dan efisiensi memberikan indikasi mengenai kemampuan BPRS dalam menghasilkan penerimaan untuk menutupi pengeluaran-pengeluarannya. Dengan menghitung dan membandingkan rasio produktivitas dan efisiensi selama periode tertentu, dapat terlihat maksimalisasi penggunaan aset-aset BPRS.

Rasio produktivitas BPRS lebih difokuskan untuk mengetahui tingkat produktivitas *credit officer* (CO) BPRS. Hal tersebut karena tugas utama CO adalah mencari dan memelihara nasabah BPRS khususnya nasabah pembiayaan. Sedangkan PYD adalah aset yang paling dominan dalam struktur aktiva produktif BPRS. Semakin produktif seorang CO BPRS tentunya akan semakin meningkatkan kemampulabaan BPRS.

Untuk menghitung rasio produktivitas CO digunakan tiga variabel yaitu jumlah CO, nasabah pembiayaan, dan PYD. Semakin besar rasio produktivitas menunjukkan semakin produktif CO BPRS. Rasio-rasio produktivitas meliputi *Number of Active Loans per Credit Officer* (NLCO) dan *Average Portfolio Outstanding per Credit Officer* (LCO).

Rasio efisiensi BPRS adalah untuk mengetahui kemampuan BPRS mengelola sumber daya (*resources*) yang dimiliki untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Untuk mengukur efisiensi BPRS terdapat variabel yaitu biaya operasional bank dan biaya upah / gaji. Semakin rendah rasio efisiensi menunjukan semakin efisien BPRS beroperasi. Untuk mengetahui efisiensi BPRS digunakan dua rasio, yaitu *operating cost ratio* (OCR) dan *salaries and benefit to average portfolio ratio* (SLR).

a. Rasio-rasio Produktivitas:

(i). Number of Active Loans per Credit Officer

Number of Active Loans per Credit Officer (NLCO) digunakan untuk mengukur seberapa banyak nasabah pembiayaan yang dikelola oleh masing-masing CO BPRS. Rasio

NLCO untuk BPRS adalah sebagaimana tampak pada tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.10. Rata-rata NLCO BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	1999	2000	2001
Nasional	110.93	111.22	117.01
Sumatera	110.35	127.68	132.15
Jabotabek	84.17	93.06	91.84
Jawa Barat	101.08	100.62	105.03
Jawa Tengah dan DIY	103.00	102.40	111.48
Jawa Timur	170.60	120.26	153.14
KTI	130.46	124.24	125.83

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam periode pengamatan terdapat peningkatan produktivitas BPRS di Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada meningkatnya kemampuan CO mengelola nasabah dengan pertumbuhan rata-rata 3% setiap tahun. Produktivitas BPRS di wilayah Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Tengah / DIY lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun demikian produktivitas BPRS di 3 regional tersebut bersama dengan BPRS di wilayah Sumatera selama periode 1999-2001 terus mengalami peningkatan. Sementara itu, produktivitas BPRS di wilayah Jawa Timur dan KTI meskipun pada tahun 2000 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun kembali meningkat pada tahun 2001. Dalam periode pengamatan juga terdapat peningkatan persentase BPRS yang produktivitasnya di atas rata-rata, yaitu dari 33% pada tahun 1999 menjadi 38% pada tahun 2001.

(ii). Average Portfolio Outstanding per Credit Officer

Average Portfolio Outstanding per Credit Officer (LCO) diperoleh dengan membandingkan antara PYD dengan jumlah CO BPRS. Dari tabel 4.11 di bawah terlihat bahwa terdapat peningkatan kuantitas PYD yang dikelola oleh seorang CO BPRS. Dalam periode pengamatan, produktivitas BPRS yang diukur dengan LCO setiap tahunnya rata-rata meningkat 31%. Suatu peningkatan yang pesat di atas NLCO BPRS. Berbeda dengan NLCO dimana terdapat regional yang pertumbuhannya negatif yaitu wilayah Jawa Timur dan KTI, LCO BPRS di seluruh regional mengalami pertumbuhan positif. Hal tersebut menunjukkan adanya kecenderungan BPRS untuk meningkatkan jumlah PYD per nasabahnya.

Tabel 4.11. Rata-rata LCO BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	1999	2000	2001
Nasional	304,892.66	415,651.14	524,084.84
Sumatera	278,961.62	460,414.74	588,118.45
Jabotabek	434,717.05	535,687.70	645,434.06
Jawa Barat	306,963.60	444,866.46	562,029.36
Jawa Tengah dan DIY	189,086.63	227,383.50	308,506.20
Jawa Timur	225,814.55	197,787.44	395,134.53
KTI	251,793.67	328,581.19	356,868.47

Sebagaimana LCO dan NLCO yang mengalami peningkatan, rata-rata PYD per nasabah juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 1999 rata-rata PYD per nasabah sebesar Rp2,74 juta, pada tahun 2001 meningkat menjadi Rp4,48 juta. Hal tersebut memberikan gambaran akan adanya peningkatan kemampuan BPRS untuk memenuhi kebutuhan nasabah serta perluasan jumlah nasabah yang dapat terlayani.

Produktifitas suatu BPRS ditentukan oleh banyak faktor, antara lain adanya insentif berupa gaji / upah / bonus yang kompetitif yang dikaitkan dengan tingkat prestasi CO BPRS. Secara umum pada tahun 2001 rata-rata gaji, upah dan honorarium CO BPRS di Indonesia cukup menarik karena 94% BPRS memberikan gaji kepada CO di atas Upah Minimum Regional (UMR). Pada tahun 2001 rata-rata UMR sebesar Rp311 ribu (setara USD 35[18]) dan rata-rata gaji, upah dan honorarium CO BPRS di Indonesia sebesar Rp725 ribu (setara USD 86).

Sebagai upaya meningkatkan produktivitas dalam 3 tahun terakhir BPRS berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Hal tersebut tampak pada gaji, upah, dan honorarium per tahun BPRS di Indonesia yang terus meningkat secara signifikan. Rata-rata biaya gaji, upah, dan honorarium per tahun BPRS di Indonesia sebesar Rp45 juta (1999), Rp59 juta (2000), dan Rp79 juta (2001) atau mengalami pertumbuhan 31% dan 25%. Pertumbuhan rata-rata upah gaji, upah, dan honorarium per BPRS tersebut masih di atas rata-rata laju inflasi pada tahu 2000 dan 2001 sebesar 9.35% dan 12.55%, dengan demikian terjadi peningkatan riil pendapatan pegawai BPRS.

Peningkatan produktivitas BPRS akan bermakna apabila diikuti dengan kualitas pembiayaan yang baik. Sebagaimana telah diuraikan pada analisa kualitas portofolio, dari rasio-rasio yang digunakan menunjukkan adanya peningkatan kualitas portofolio BPRS

18 USD 1 = Rp9000,-

pada periode tahun 1999-2001. Untuk melihat hubungan antara produktivitas dengan kualitas portofolio maka dilakukan analisa korelasi antara NLCO dengan PaR dengan hasil bahwa terdapat korelasi negatif (walaupun lemah) dengan signifikansi tinggi yaitu 99% antara NLCO dengan PaR. Korelasi NLCO dan PaR dalam tahun 1999, 2000 dan 2001 adalah –0.29,-0.25,dan –0.14. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa meningkatnya produktivitas diikuti dengan dengan semakin menurunnya proporsi pembiayaan non lancarnya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis dengan menggunakan NLCO dan LCO adalah secara umum terjadi peningkatan produktivitas BPRS baik dilihat dari semakin banyaknya nasabah yang dapat dilayani maupun dari meningkatnya nilai pembiayaan per nasabah. Peningkatan produktivitas BPRS juga diikuti dengan semakin membaiknya kualitas portofolio pembiayaan. Upaya untuk meningkatkan produktivitas diantaranya dilakukan dengan meningkatkan gaji, upah dan honorarium pegawai BPRS.

b. Rasio-rasio Efisiensi:

Selain rasio produktivitas maka rasio efiensi juga merupakan salah satu indikator kemampuan manajemen untuk mengelola sumber daya *(resources)* yang dimiliknya. Terdapat beberapa rasio yang digunakan untuk melihat tingkat efisiensi BPRS, yaitu *Operating Cost Ratio* (OCR), dan *Salaries and Benefits to Portfolio Outstanding* (SLR).

(i). Operating Cost Ratio

Operating Cost Ratio (OCR) diperoleh dengan membandingkan biaya operasional dan PYD BPRS. OCR dapat menyediakan indikasi berapa biaya yang diperlukan untuk jumlah tertentu dari pembiayaan yang diberikan. Tabel 4.12 di bawah ini memberikan gambaran perkembangan OCR BPRS.

Tabel 4.12. Rata-rata OCR BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	1999	2000	2001
Nasional	21.13%	17.80%	18.23%
Sumatera	19.11%	17.43%	17.93%
Jabotabek	21.40%	16.46%	17.73%
Jawa Barat	17.43%	16.18%	18.37%
Jawa Tengah dan DIY	20.46%	15.35%	13.27%
Jawa Timur	24.21%	23.94%	19.52%
KTI	27.66%	19.96%	20.69%

Dari tabel diatas di atas dapat dilihat bahwa rata-rata OCR BPRS di semakin menurun. Rata-rata pertumbuhan OCR BPRS dalam periode 1999-2001 adalah -7% setiap tahunnya. Dengan kata lain rata-rata BPRS di Indonesia semakin efisien dari sisi biaya operasional. Kondisi tersebut juga terjadi pada hampir semua regional kecuali di wilayah Jawa Barat yang pada periode pengamatan mengalami peningkatan OCR. Peningkatan OCR BPRS di wilayah Jawa Barat sejalan dengan meningkatnya jumlah nasabah dan pembiayaan non lancar pada regional tersebut. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian USAID yang menyebutkan bahwa OCR LKM yang sukses berkisar antara 13-21%, maka baik pada tingkat nasional maupun regional OCR BPRS relatif masih dalam batas-batas efisiensi yang baik.

(ii). Salaries and Benefits to Average Portfolio Ratio

Selain biaya operasional maka besarnya gaji pegawai BPRS juga dapat menjadi indikator efisiensi jika dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan. *Salaries and Benefits to Average Portfolio Ratio* (SLR) lebih menekankan adanya *reward* atas prestasi SDM BPRS terhadap pencapaian tingkat portfolio tertentu. Tabel 4.13 di bawah memberikan gambaran perkembangan SBAPR BPRS.

Tabel 4.13. Rata-rata SLR BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	1999	2000	2001
Nasional	11.77%	11.12%	11.23%
Sumatera	10.59%	9.90%	9.94%
Jabotabek	12.42%	14.90%	10.55%
Jawa Barat	7.40%	6.89%	9.31%
Jawa Tengah dan DIY	13.36%	11.71%	24.62%
Jawa Timur	12.60%	10.97%	11.46%
KTI	17.21%	12.29%	9.92%

Dari tabel diatas diketahui bahwa rasio SLR BPRS selama 3 tahun terakhir relatif tetap yaitu 11%. Bila dibandingkan dengan LKM yang sukses berdasarkan hasil penelitian USAID yang menyebutkan bahwa SLR LKM yang sukses adalah antara 4-16%, dapat dikatakan bahwa rata-rata BPRS di Indonesia telah efisien dari aspek biaya tenaga kerja.

Kesimpulan yang diperoleh dari rasio-rasio produktivitas dan efisiensi adalah sebagai berikut: (a) terjadinya peningkatan produktivitas BPRS yang dilihat dari kemampuan CO BPRS mengelola nasabah pembiayaan dan semakin besarnya jumlah PYD per nasabah. Produktivitas tersebut masih belum diikuti dengan perbaikan kualitas PYD, dan (b) pengelolaan sumber-sumber yang dimiliki BPRS juga semakin efisien namun tetap memperhatikan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai BPRS.

Kemampuan Finansial

Kemampuan finansial mencerminkan kapasitas BPRS untuk menutupi berbagai macam biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diterimanya. BPRS dikatakan mampu secara finansial apabila dalam kegiatannya tidak tergantung kepada sumber-sumber dana yang tidak memerlukan biaya untuk mendapatkannya, seperti yang berasal dari subsidi maupun hibah dari donor dan dari hasil investasinya dapat menutup biaya-biaya tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diketahui bahwa secara umum karakteristik BPRS dari awal tidak bergantung kepada dana-dana gratis (hibah) karena salah satu persyaratan untuk dapat mendirikan BPRS adalah adanya kewajiban pemilik untuk menyediakan modal disetor minimum. Selanjutnya keperluan dana untuk operasional BPRS lebih banyak diupayakan dari pihak ketiga bukan bank dalam bentuk tabungan dan deposito. Hal tersebut dengan tidak menutup kemungkinan pada tahapan awal operasional lebih banyak mengandalkan dana dari pemilik. Mengingat dana yang diperoleh adalah dana komersial tentunya akan berdampak pada tingginya biaya finansial bank. Dengan demikian menuntut bank untuk lebih jeli / selektif dalam memilih bentuk investasi agar pendapatan yang diperoleh mampu menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan.

Pendapatan BPRS diperoleh dari dana baik yang bersumber dari modal maupun pihak ketiga yang diinvestasikan atau digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Sedangkan biaya muncul untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Biaya yang mungkin muncul dalam sebuah BPRS dapat terdiri dari empat kelompok yaitu biaya finansial (bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah penabung / deposan), loan loss provisions (cadangan penghapusan pembiayaan), biaya operasional dan cost of capital. Biaya finansial dalam terminologi bank konvensional adalah biaya bunga yang harus dibayarkan bank kepada penabung atau deposan. Sedangkan untuk perbankan syariah biaya finansial hanya berupa perkiraan atas ekspektasi masyarakat terhadap tingkat imbalan yang diharapkan. Pada umumnya sumber dana BPRS adalah dalam bentuk tabungan dan deposito mudharabah. Untuk keperluan analisa maka data yang digunakan berupa data historis imbalan bagi hasil yang diberikan BPRS kepada nasabah deposan / penabung. Untuk menilai kemampuan finansial BPRS dipergunakan tiga alat ukur yaitu spread, operational self-sufficiency (OSS) dan financial self-sufficiency (FSS).

(i). Spread

Spread BPRS diperoleh dari selisih antara pendapatan operasional dikurangi dengan bagi hasil yang diterima nasabah penabung / deposan yang selanjutnya dibagi dengan rata-

rata PYD. Secara teoritis, semakin besar *spread* semakin tinggi pula kemungkinan untuk memperoleh keuntungan. Meskipun laba rugi bank juga dipengaruhi biaya-biaya lainnya seperti biaya operasional, PPAP dan cost of capital. Tabel 4.14 Berikut ini menunjukkan perkembangan spread BPRS di Indonesia dalam periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2001.

Tabel 4.14. Rata-rata Spread BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	1999	2000	2001
Nasional	20.27%	20.24%	21.88%
Sumatera	21.38%	19.90%	21.04%
Jabotabek	17.42%	17.65%	19.50%
Jawa Barat	15.02%	18.52%	18.68%
Jawa Tengah dan DIY	29.75%	25.41%	34.11%
Jawa Timur	20.27%	26.00%	26.59%
KTI	24.89%	21.14%	21.61%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata BPRS di Indonesia memiliki spread sebesar 20-21% setiap tahunnya. Persentase BPRS yang nilai spread-nya di atas rata-rata nasional sebesar 39%-40%. Untuk skala regional, maka BPRS di wilayah Jawa Tengah / DIY memiliki *spread* yang paling tinggi. Jika dibandingkan dengan ROA maka untuk tahun 1999, 2000 dan 2001, ROA untuk wilayah Jawa Tengah / DIY masing-masing sebesar 0.43, 0.09, 0.11 yang berarti jauh atas ROA industri BPRS sebesar 0.03, 0.02, dan 0.03.

Sebagai perbandingan untuk BPRS di wilayah Jabotabek meskipun memiliki rata-rata *spread* di atas rata-rata nasional namun memiliki nilai ROA di bawah rata-rata nasional bahkan pada tahun 1999 dan 2000 ROA rata-rata BPRS di regional tersebut adalah negatif. Untuk wilayah Jabotabek rendahnya ROA BPRS setidaknya disebabkan dua hal yaitu pertama, operasional yang tidak efisien sebagaimana terlihat dari rasio BO / PO khususnya pada tahun 1999 dan 2000 yang besarnya di atas 100% yaitu masing-masing 151% dan 159%. Sebab kedua adalah tingginya PaR di atas rata-rata industri. Tingginya PaR akan mempengaruhi kemampulabaan BPRS. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada jaminan *spread* yang tinggi akan memberikan hasil yang tinggi pula karena masih akan ditentukan oleh komponen-komponen biaya lainnya.

(ii). Operational self-sufficiency

Operational self-sufficiency (OSS) diperoleh dengan membagi pendapatan operasional dengan biaya-biaya langsung *(direct cost)* yang meliputi biaya finansial, biaya operasional

dan PPAP. OSS dapat memberikan indikasi kemungkinan pendapatan yang diperoleh dapat menutup biaya-biaya langsung. Rasio OSS BPRS dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 4.15. Rata-rata OSS BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	1999	2000	2001
Nasional	103.31%	110.45%	112.98%
Sumatera	107.63%	112.62%	114.50%
Jabotabek	92.01%	98.45%	103.67%
Jawa Barat	109.15%	116.52%	112.75%
Jawa Tengah dan DIY	116.37%	127.60%	141.91%
Jawa Timur	99.78%	111.09%	119.81%
KTI	103.07%	109.42%	104.38%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata BPRS di Indonesia memiliki nilai OOS diatas 100% dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, BPRS di Indonesia dinilai mampu secara operasional karena pendapatan operasional BPRS mampu menutupi *direct cost*-nya. Meskipun rata-rata BPRS di regional 2 dan 5 pernah mengalami OSS dibawah 100% namun cenderung membaik sehingga pada tahun 2001 untuk regional 2 dan tahun 2000 untuk regional 5 bisa mencapai OSS di atas 100%. Jika dilihat persentase BPRS yang memiliki OSS di atas 100% pada tiga tahun terakhir justru mengalami penurunan yaitu 65%, 59% dan 58% BPRS. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara kualitas OSS BPRS meningkat namun secara kuantitas jumlah BPRS yang secara operasional dinilai mampu justru mengalami penurunan.

(iii). Financial self-sufficiency

Financial self-sufficiency (FSS) memberikan indikator apakah pendapatan yang diperoleh dapat menutup biaya-biaya operasional langsung *(direct cost)* dan biaya-biaya operasional tidak langsung *(indirect cost)* yaitu *Cost of Capital*[19] . *Cost of Capital* dipertimbangkan sebagai biaya untuk menjaga nilai equity dari inflasi dan biaya untuk mendapatkan hutang komersial. Dengan demikian untuk memperoleh FSS BPRS adalah dengan membagi pendapat operasional dengan seluruh biaya operasional yang meliputi biaya-biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung. Tabel 4.16 berikut menunjukkan perkembangan FSS BPRS pada tahun 1999 – 2001.

19 Formula dari Cost of Capital adalah=[(Inflation rate x (Average equity-Average fixed asset)]+[(Average funding liabilities x market rate of Debt) – actual financing costs].

Tabel 4.16. Rata-rata FSS BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	2000	2001
Nasional	80.20%	77.43%
Sumatera	79.55%	73.07%
Jabotabek	72.87%	75.04%
Jawa Barat	80.12%	76.45%
Jawa Tengah dan DIY	95.98%	96.18%
Jawa Timur	87.60%	85.07%
KTI	82.69%	77.14%

Meskipun OSS BPRS di Indonesia melebihi 100% namun nilai FSS rata-rata BPRS di Indonesia masih di bawah 100% dan cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata BPRS di Indonesia belum dapat menutupi biaya tidak langsung *(cost of capital)*. Dengan tingkat keuntungan yang dicapai sekarang ini BPRS masih rentan terhadap gejolak inflasi serta kemampuan untuk mendapatkan dana-dana komersial yang pada umumnya juga memasukkan unsur inflasi sebagai indikator tingkat keuntungan yang ingin diperoleh.

Penurunan FSS BPRS semakin terlihat jika kita bandingkan persentase BPRS yang memiliki FSS 100% atau lebih terhadap total BPRS. Pada tahun 2000 masih terdapat 23% BPRS dengan FSS 100% atau lebih, namun pada tahun 2001 turun hingga menjadi 14%. Faktor eksternal seperti inflasi memberikan kontribusi bagi peningkatan *cost of capital* BPRS. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat peningkatan rata-rata laju inflasi yaitu dari 9.35% pada tahun 2000 menjadi 12.55% pada tahun 2001.

Dari penggunaan kedua rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum BPRS telah dinilai mampu *(viable)* secara operasional tetapi belum mampu secara finansial. Terdapat kecenderungan penurunan persentase BPRS yang dinilai mampu dari segi operasional maupun finansial.

Mengingat faktor inflasi adalah faktor eksternal yang tidak dapat dipengaruhi oleh BPRS maka untuk dapat meningkatkan kemampuan finansialnya beberapa alternatif yang dapat dilakukan BPRS diantaranya adalah memperbaiki kualitas pembiayaannya (PaR). Perbaikan PaR akan mengurangi kewajiban bank untuk membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktifnya. Selain itu dapat pula dilakukan dengan meningkatkan efisiensi operasional BPRS berupa pengurangan biaya-biaya yang tidak perlu. Cara ketiga yang dapat ditempuh adalah dengan memperbaiki komposisi portofolio pembiayaan serta struktur sumber dana.

Dengan mengacu kepada rasio-rasio *portfolio quality*, efisiensi dan produktivitas BPRS selama tahun 1999 sampai dengan 2001, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BPRS pada umumnya untuk mencapai tingkat *financial self-sufficiency* adalah dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas serta memperbaiki kualitas PYD.

Kemampulabaan

Rasio-rasio keuntungan untuk mengukur tingkat keuntungan BPRS dikaitkan dengan struktur neracanya. Rasio-rasio tersebut meliputi *Return on Assets ratio* (ROA), *Return on Business Ratio* (ROB), dan *Return on Equity* (ROE).

(i). Return on Assets Ratio

Return on Assets Ratio (ROA) membandingkan antara pendapatan bersih dengan total asset bank. Tabel 4.17 menggambarkan perkembangan rata-rata ROA BPRS di Indonesia. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata BPRS di Indonesia mengalami peningkatan ROA dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga terjadi pada setiap regional. Beberapa wilayah seperti Jabotabek, Jawa Barat, dan KTI bahkan telah mampu memperbaiki kinerjanya sehingga tidak lagi memiliki ROA negatif. Namun demikian nilai ROA ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan LKM yang sukses berdasarkan hasil penelitian USAID yaitu 7,4%. Nilai rata-rata ROA terbesar terdapat pada BPRS di Jawa Tengah dan DIY yaitu 7.51% pada tahun 2001.

Tabel 4.17. Rata-rata ROA BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	1999	2000	2001
Nasional	0.03%	0.46%	2.35%
Sumatera	2.09%	1.94%	2.14%
Jabotabek	-2.15%	-4.48%	1.11%
Jawa Barat	-0.62%	1.85%	0.93%
Jawa Tengah dan DIY	4.62%	5.63%	7.51%
Jawa Timur	0.01%	1.59%	3.30%
KTI	-1.13%	1.38%	3.86%

Jika dilihat per individu BPRS maka pada tahun 1999 terdapat 38% BPRS dengan ROA diatas industri. Persentase tersebut naik tajam menjadi 62% pada tahun 2000 dan turun sedikit menjadi 54% pada tahun 2001. Kenaikan tajam pada tahun 2000 karena terdapat 55% BPRS yang ROA-nya naik dari tahun sebelumnya. Sedangkan penurunan tahun 2001 karena terdapat 21% BPRS yang mengalami penurunan ROA dari periode sebelumnya.

(ii). Return on Business Ratio

Return on Business ratio (ROB) membandingkan antara pendapatan bersih dengan *business base* rata-rata total aktiva ditambah kewajiban kepada pihak ketiga. Rasio ini untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan mengelola liabilitiesnya yang bersumber dari pihak ke tiga. Tabel 4.18 memberikan gambaran perkembangan ROB BPRS. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata ROB BPRS di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian pada tahun 1999 ROB nasional bernilai negatif meskipun ROA di tahun yang sama adalah positif. Hal ini disebabkan karena rata-rata selisih ROA dengan ROB yang positif masih lebih rendah dibandingkan rata-rata selisih ROA dengan ROB yang negatif.

Meskipun pada tahun 1999 dan 2000 rata-rata ROB nasional lebih kecil daripada rata-rata ROA nasional, pada tahun 2001 rata-rata ROB nasional sudah bisa melebihi rata-rata ROA nasional. Hal ini berarti bahwa usaha penghimpunan dana dari masyarakat untuk BPRS di Indonesia masih menguntungkan.

Tabel 4.18. Rata-rata ROB BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	1999	2000	2001
Nasional	-0.04%	0.01%	2.60%
Sumatera	2.37%	2.22%	2.45%
Jabotabek	-2.48%	-8.09%	1.28%
Jawa Barat	-0.21%	2.28%	1.38%
Jawa Tengah dan DIY	5.46%	7.42%	9.66%
Jawa Timur	-0.21%	1.75%	3.91%
KTI	-2.34%	2.50%	2.70%

(iii). Return on Equity Ratio

Return on Equity Ratio (ROE) didapat dengan membandingkan antara keuntungan dengan rata-rata modal BPRS. Rasio ini memberikan informasi pemodal mengenai tingkat keuntungan BPRS dari modal yang telah diinvestasikan. Tabel 4.19 berikut memberikan gambaran ROE BPRS tahun 2000 dan 2001.

Dari tabel 4.19 dapat dilihat bahwa rata-rata ROE BPRS di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2001. Bila dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2000 (9,35%) dan 2001 (12,55%) maka ROE BPRS di Indonesia secara umum masih diatas tingkat inflasi sehingga dapat dikatakan masih menarik bagi investor untuk menanamkan dananya pada BPRS.

Tabel 4.19. Rata-rata ROE BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	2000	2001
Nasional	13.87%	14.38%
Sumatera	17.77%	18.44%
Jabotabek	7.87%	13.06%
Jawa Barat	17.44%	5.86%
Jawa Tengah dan DIY	26.54%	35.88%
Jawa Timur	12.22%	17.05%
KTI	7.42%	8.35%

Dari rasio-rasio kemampulabaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam periode pengamatan terdapat peningkatan kemampulabaan BPRS. BPRS dapat dikatakan mampu menghasilkan keuntungan dari pengelolaan sumber-sumber dana mahal yaitu tabungan dan deposito. Dari sudut pandang investor, investasi di BPRS menguntungkan karena tingkat pengembalian di atas rata-rata dan terus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampulabaan BPRS diantaranya adalah operasional yang relatif belum efisien dan tingginya pembiayaan bermasalah. Kedua faktor tersebut telah berusaha diperbaiki oleh manajemen BPRS. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin efisien operasional BPRS yang tampak pada rasio BO / PO dari 107% pada tahun 1999 menjadi 89% pada tahun 2001 dan turunnya tingkat pembiayaan non lancarnya yang tampak pada rasio PaR dari 21% pada tahun 1999 menjadi 18% pada tahun 2001.

Kecukupan Modal

Modal memiliki berbagai fungsi seperti keamanan, stabilitas, fleksibilitas dan sebagai bemper terhadap risiko-risiko serta kerugian. Ketika kemungkinan merugi meningkat maka kebutuhan modal yang cukup juga meningkat. Mengingat bahwa nasabah pembiayaan BPRS memiliki berbagai kelemahan seperti manajerial dan agunan, maka diperlukan modal yang memadai bagi BPRS untuk menutup kerugian baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak. Terdapat dua rasio permodalan BPRS yang dipergunakan untuk mengukur kinerja BPRS yaitu *Leverage Ratio* (LR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

(i). Leverage

Leverage (LR) diperoleh dengan membandingkan antara modal dengan kewajiban bank pada pihak III. Gambar 4.1. menggambarkan komposisi modal dan kewajiban pada pihak III. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata BPRS di Indonesia struktur

pendanaannya lebih banyak berasal dari DPK dibandingkan Modal dengan komposisi yang relatif tidak banyak berubah dari tahun 1999 – 2001. Dengan demikian dalam menjalankan operasionanya, BPRS menggunakan dana pihak III sebanyak hampir lima kali lipat dari modal yang dimiliki. Hal tersebut tampak pada tabel 4.20 di bawah ini:

Gambar 4.1 Perkembangan Leverage BPRS di Indonesia

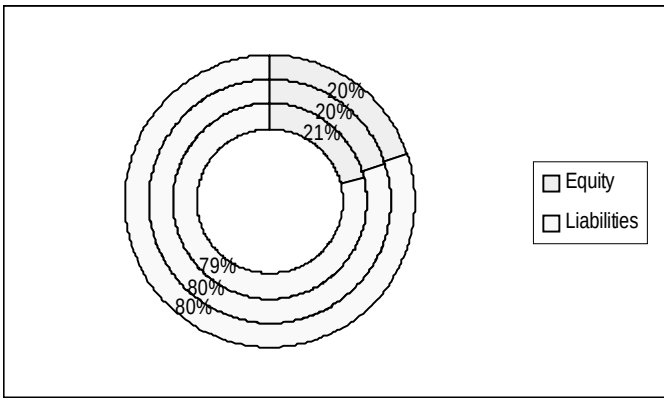

Tabel 4.20. Rata-rata LR BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	1999	2000	2001
Nasional	4.69	4.15	4.79
Sumatera	3.96	4.30	4.84
Jabotabek	6.51	3.75	4.88
Jawa Barat	4.79	5.15	6.82
Jawa Tengah dan DIY	3.07	3.02	3.24
Jawa Timur	2.78	3.25	2.56
KTI	5.08	4.25	4.16

(ii). Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio (CAR) BPRS diperoleh dengan membandingkan modal dengan aktiva produktif yang telah diberi bobot tertentu. CAR secara umum banyak digunakan untuk mengukur permodalan bank. Saat ini standar CAR bank mengacu kepada BIS yaitu minimal 8%. Perkembangan CAR BPRS dapat dilihat pada tabel 4.21.

Bila dibandingkan dengan standar CAR internasional sebesar 8% maka nilai CAR rata-rata BPRS di Indonesia berada jauh diatasnya yaitu sekitar 30%. Hal ini menunjukkan

bahwa rata-rata BPRS di Indonesia mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk menyerap kerugian akibat pembiayaan yang bermasalah. Selain itu dengan relatif meningkatnya leverage dan menurunnya CAR dalam kurun waktu 1999-2001 mengindikasikan bahwa rata-rata BPRS di Indonesia mengalami peningkatan kemampuan dalam menghimpun dana masyarakat.

Tabel 4.21. Rata-rata CAR BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	1999	2000	2001
Nasional	0.3543	0.2991	0.3169
Sumatera	0.3409	0.2633	0.2822
Jabotabek	0.3584	0.2859	0.2798
Jawa Barat	0.3063	0.2442	0.3103
Jawa Tengah dan DIY	0.4102	0.3937	0.3889
Jawa Timur	0.4574	0.4474	0.4158
KTI	0.3532	0.3109	0.3518

Komposisi antara modal dengan dana pihak ketiga memberikan banyak konsekuensi. Semakin tinggi leverage suatu bank akan meningkatkan risiko likuiditas bank namun pada sisi lain akan meningkatkan keuntungan bagi pemodal. Karena dengan komposisi modal yang semakin kecil dibandingan dana pihak III maka tingkat keuntungan pemodal menjadi semakin besar. Hal itu tampak pada ROE tahun 2000 dan 2001 yaitu 13.87% dan 14.38%.

Dari analisis permodalan di atas dapat disimpulkan bahwa BPRS cenderung meningkatkan dana pihak III sebagai sumber pendanaannya namun masih tetap memperhatikan batas minimum yang telah ditetapkan oleh BI yaitu CAR minimum 8%. Dengan CAR sekitar 30% kemampuan permodalan BPRS untuk menyerap kerugian relatif cukup besar.

Cakupan Operasional

Cakupan operasional adalah untuk melihat tingkat keluasan jangkauan BPRS dalam melayani nasabahnya. Jangkauan ini dilihat dari tiga aspek yaitu a. kelompok nasabah dan staf BPRS, b. penyebaran pembiayaan, dan c. penyebaran penghimpunan dana.

a. Kelompok Nasabah dan Staf BPRS.

Analisa dalam kelompok ini adalah untuk: (a) melihat komposisi nasabah wanita baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana BPRS. Dalam berbagai literatur

disebutkan bahwa wanita adalah kelompok masyarakat yang kurang mendapat akses kepada sektor formal khususnya di bidang keuangan dan perbankan dibandingkan pria. Sehingga keberadaan LKM sebagaimana BPRS diharapkan mampu membesarkan peluang wanita untuk mendapatkan akses di bidang keuangan dan perbankan; (b) melihat kemampuan BPRS menyerap tenaga kerja; dan (c) melihat kemampuan menjalankan fungsi intermediasi.

Tabel 4.22 di bawah ini menggambarkan jangkauan BPRS pada tahun 2001 terhadap nasabah wanita, kemampuan menyerap tenaga kerja serta perbandingan antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan.

Tabel 4.22. Nasabah dan Staf BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	Jml Wanita sbg % dari Total Borrowers	Jml Wanita sbg % dari Total Depositors	Total Pegawai	DPK/PYD
Nasional	35	44	13	0.9019
Sumatera	36	46	13	1.2026
Jabotabek	30	43	12	0.7578
Jawa Barat	38	37	15	0.6411
Jawa Tengah dan DIY	27	53	12	1.0135
Jawa Timur	43	43	15	0.8814
KTI	33	45	11	0.8765

(i). Jumlah wanita sebagai persentase dari total borrowers

Rata-rata nasabah pembiayaan BPRS di Indonesia masih didominasi oleh nasabah pria. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata jumlah nasabah wanita sebagai borrowers hanya sebesar 34%. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian McGuire (1998)[20] yang menunjukkan bahwa untuk wilayah Asia persentase nasabah pembiayaan wanita sebanyak 45% maka jangkauan BPRS terhadap nasabah wanita relatif lebih rendah. Fenomena ini mungkin dapat dijelaskan bahwa di Indonesia, sektor usaha masih didominasi oleh pria. Selain itu mungkin pria (suami) dianggap lebih kompeten untuk berhubungan dengan bank ketimbang wanita (istri) meskipun dana dari bank tersebut sebenarnya digunakan untuk membiayai usaha sang istri.

Permasalahan agunan juga pada umumnya juga menjadi hambatan wanita untuk memperoleh pembiayaan. Hal tersebut karena pada umumnya aset keluarga adalah atas

20 Paul B. McGuire, The Asian Financial Crisis-Some Implications for Microfinance, the Microbanking Bulletin, July 1998, hal.28

nama kepala keluarga (umumnya adalah laki-laki). Sebagai catatan disini untuk BPRS yang berada di wilayah sumatera khususnya di daerah minang persentase nasabah pembiayaan wanita lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal tersebut mungkin ada kaitannya dengan budaya lokal yang menempatkan wanita sebagai kepala keluarga.

(ii). Jumlah wanita sebagai persentase dari total depositors

Bila dibandingkan dengan persentase wanita yang menjadi nasabah pembiayaan maka persentase wanita yang menjadi nasabah dana 9% lebih banyak. Secara umum pula hampir di semua regional, persentase wanita yang menjadi nasabah dana lebih besar jika dibandingkan dengan nasabah pembiayaan. Hal ini mungkin bisa dijelaskan bahwa wanita cenderung lebih dapat menyisihkan uangnya untuk disimpan di bank. Bertolak belakang dengan rendahnya persentase jumlah wanita yang menjadi nasabah pembiayaan BPRS di wilayah Jawa Tengah / DIY, persentase jumlah wanita yang menjadi nasabah dana justru yang paling besar dibandingkan dengan regional lainnya. Sedangkan persentase wanita yang menjadi nasabah dana terendah terdapat pada BPRS-BPRS di wilayah Jawa Barat.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa BPRS memberikan porsi yang cukup besar dan relatif berimbang baik dalam hal penghimpunan dana maupun pembiayaan. Terdapat regional yang jumlah porsi wanita menerima pembiayaan lebih besar dari wanita penabung / deposan adalah wilayah Jawa Barat.

(iii). Jumlah staf

Setiap BPRS di Indonesia rata-rata memiliki 13 orang pegawai dengan komposisi dari Direksi sampai Pelaksana. Rata-rata jumlah pegawai BPRS terbanyak yaitu 15 orang terdapat di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan rata-rata jumlah pegawai yang paling sedikit yaitu 11 terdapat di wilayah KTI. Kemampuan BPRS dalam menyerap tenaga kerja tentunya dipengaruhi oleh besarnya volume usaha BPRS. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil positif korelasi antara total aset dengan jumlah pegawai dengan tingkat keyakinan 99.9%. Untuk beberapa kasus ekstrim terdapat BPRS yang hanya memiliki pegawai empat orang. Sedangkan BPRS dengan jumlah pegawai terbanyak adalah 32 orang.

Dalam hal rekruitmen tenaga kerja BPRS pada umumnya diambil dari daerah dimana BPRS berlokasi. Hal tersebut dengan berbagai alasan seperti lebih mengerti potensi daerah yang bersangkutan dan menghemat biaya trasportasi.

(iv). Rasio volume of deposits to volume of outstanding loans

Rata-rata BPRS di Indonesia menggunakan seluruh DPK yang berhasil dihimpun untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat (90% dana pembiayaan berasal dari DPK). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi berjalan dengan sangat baik. Dengan karakteristiknya yang melayani nasabah lokal maka penyaluran dana BPRS juga kembali kepada masyarakat setempat sehingga kontribusi BPRS pada pengembangan perekonomi setempat cukup besar karena dana tidak mengalir ke tempat lain.

Penggunaan DPK yang kurang optimal terdapat di wilayah Sumatera. Hal ini disebabkan karena ada satu BPRS di wilayah tersebut yang berhasil dalam penghimpunan dana dari masyarakat tetapi kurang berhasil dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.

b. Penyebaran Pembiayaan

Penyebaran pembiayaan BPRS meliputi rata-rata nasabah, rata-rata pembiayaan per bank dan per nasabah, jumlah pembiayaan terkecil dan terbesar untuk satu orang nasabah, dan jangka waktu pembiayaan BPRS. Tabel 4.23 berikut ini data penyebaran pembiayaan per 31 Desember 2001.

Tabel 4.23. Penyebaran Pembiayaan BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	Nasabah	PYD	Pertumbuhan PYD	Loan Size (min.)	Loan Size (max.)	Loan Size (average)	Loan Term
Nasional	371	1,628,840	0.3099	1,030	45,282	6,396	12
Sumatera	423	1,562,787	0.3448	521	37,062	7,103	15
Jabotabek	253	2,118,099	0.3116	2,643	70,991	9,417	11
Jawa Barat	412	2,097,859	0.3154	446	42,500	4,206	11
Jawa Tengah dan DIY	342	1,101,810	0.2800	225	42,500	9,650	15
Jawa Timur	483	1,065,096	0.3105	484	38,571	4,368	12
KTI	353	997,056	0.2542	689	25,267	2,743	11

(i). Jumlah nasabah aktif

Rata-rata BPRS di Indonesia mempunyai nasabah pembiayaan sebanyak 371 orang. Secara umum BPRS yang memiliki nasabah pembiayaan di atas rata-rata nasional terdapat di regional 1, 3, dan 5. Sedangkan BPRS yang memiliki nasabah pembiayaan di bawah rata-

rata nasional terdapat di regional 2, 4, dan 6. BPRS di regional 2 secara umum memiliki jumlah nasabah pembiayaan yang paling sedikit dibandingkan BPRS-BPRS di regional lainnya. Jumlah nasabah terbesar untuk satu BPRS adalah 1.633 dan terkecil adalah 18 nasabah. Berdasarkan penyebarannya maka terdapat 31% BPRS yang memiliki jumlah nasabah di atas rata-rata.

(ii). Average Outstanding Portfolio

Rata-rata setiap BPRS di Indonesia memberikan pembiayaan kepada masyarakat rata-rata sebesar 1,63 miliar rupiah. BPRS yang memberikan pembiayaan diatas rata-rata nasional rata-rata terdapat di wilayah Jabotabek dan Jawa Barat. Sedangkan rata-rata pembiayaan yang paling kecil diberikan oleh BPRS di wilayah KTI. Bila dibandingkan dengan jumlah nasabah pembiayaannya yang paling sedikit di Jabotabek maka justru pembiayaan yang paling besar diberikan di regional tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa di wilayah Jabotabek setiap nasabah menerima pembiayaan yang jumlahnya lebih besar dibandingkan nasabah pembiayaan di regional lainnya. Sebagaimana kita tahu wilayah Jabotabek adalah Ibukota negara beserta daerah penyangganya yang merupakan pusat perdagangan, jasa dan industri dengan biaya hidup yang relatif tinggi di banding daerah lain di Indonesia.

Jumlah nasabah pembiayaan memiliki hubungan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Semakin besar jumlah nasabah BPRS pada umumnya juga diikuti dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang diberikan. Hal tersebut dibuktikan dengan analisa korelasi yang menunjukkan hasil positif hubungan antara jumlah nasabah dengan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat keyakinan 99.9%.

(iii). Pertumbuhan PYD dalam tiga tahun terakhir.

Pertumbuhan PYD BPRS relatif pesat yaitu sebesar 30,99% per tahun selama tiga tahun terakhir. Pertumbuhan yang paling pesat terjadi di regional 1 sebesar 34,48% diikuti regional 3, 2, dan 5 masing-masing sebesar 31,54%, 31,16%, dan 31,05%. Sedangkan pertumbuhan paling lambat terjadi di regional 6 yaitu sebesar 25,42%. Pertumbuhan yang pesat juga dipacu dengan semakin meningkatnya kemampuan menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan deposito.

Dalam tiga tahun terakhir dana masyarakat yang berhasil dihimpun BPRS mengalami rata-rata pertumbuhan yang lebih cepat dari pembiayaan yaitu sebesar 55%. Selama tahun 1999 – 2001, terdapat 41% BPRS yang pertumbuhan dana pihak ketiga di atas rata-rata dan 8% yang mengalami pertumbuhan negatif. BPRS-BPRS yang memiliki pertumbuhan dana

pihak ketiga negatif juga mengalami pertumbuhan negatif pembiayaan yang diberikan. Hasil analisa korelasi antara pembiayaan dengan penghimpunan dana diketahui bahwa terdapat korelasi positif antara semakin meningkatnya PYD dengan kemampuan bank tersebut menghimpun dana masyarakat dengan tingkat keyakinan 99%.

(iv). Loan size (minimum- maximum)

Rata-rata pembiayaan minimum yang diberikan BPRS di Indonesia adalah 1 juta rupiah dan Rata-rata pembiayaan maksimum 45 juta rupiah. Rata-rata pembiayaan minimal maupun maksimal yang diberikan BPRS paling besar diberikan BPRS di wilayah Jabotabek. Selain itu wilayah Jabotabek juga merupakan satu-satunya regional yang memberikan pembiayaan minimal maupun maksimal yang lebih besar daripada rata-rata nasional. Rata-rata pembiayaan minimal terendah diberikan oleh BPRS di Jawa Timur. Sedangkan pembiayaan maksimal terendah diberikan BPRS di KTI.

(v). Average Outstanding Loan Size

Rata-rata pembiayaan yang diberikan untuk setiap nasabah baru rata-rata sebesar 6,39 juta rupiah. Regional yang memberikan pembiayaan bagi nasabah baru lebih besar daripada nasional adalah wilayah Sumatera, Jabotabek dan Jawa Tengah. Sedangkan yang paling rendah terdapat di wilayah KTI.

(vi). Average Loan Term

Rata-rata jangka waktu pembiayaan yang diberikan BPRS di Indonesia adalah 12.27 bulan. Terdapat 63% BPRS yang rata-rata jangka waktu pembiayaannya adalah 1 tahun. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa waktu 1 tahun adalah jangka waktu ideal untuk BPRS memberikan pembiayaan kepada nasabah. Namun demikian tidak menutup kemungkinan BPRS juga memberikan jangka waktu yang lebih pendek atau lebih lama. Hal tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan nasabah.

c. Penyebaran Penghimpunan Dana

Penyebaran penghimpunan dana pihak ketiga meliputi rata-rata tabungan dan deposito per nasabah yang berhasil dihimpun oleh BPRS serta rata-rata jumlah penabung dan deposan BPRS. Tabel 4.24 berikut ini menunjukkan penyebaran penghimpunan dana BPRS

Tabel 4.24. Penyebaran Penghimpunan Dana BPRS di Indonesia per Regional

REGIONAL	Tabungan	Deposito	Savings Deposits per Staff Member	Savers Per Staff Member
Nasional	521	14,282	411,457	566
Sumatera	403	13,214	592,406	869
Jabotabek	444	11,109	405,116	450
Jawa Barat	301	22,774	375,828	653
Jawa Tengah dan DIY	549	10,561	319,889	448
Jawa Timur	1,164	10,307	213,842	262
KTI	663	14,598	323,210	436

(i). Value of Average Savings Account

Rata-rata setiap BPRS di Indonesia pada tahun 2001 berhasil menghimpun dana dari masyarakat sebesar 521 ribu rupiah per nasabah. Regional 5 berhasil menghimpun dana tabungan yang paling besar dibandingkan regional lain yaitu mencapai 1 juta rupiah per nasabah. Sedangkan regional yang paling rendah menghimpun tabungan per nasabah adalah regional 3.

Rata-rata setiap BPRS di Indonesia berhasil menghimpun dana dalam bentuk deposito dari masyarakat sebesar 14 juta rupiah per nasabah. Dibandingkan dengan tabungan per nasabah yang relatif kecil maka deposito per nasabah BPRS di regional 3 adalah yang paling besar dibandingkan regional lainnya yaitu lebih dari 22 juta rupiah per nasabah. Sebaliknya regional 5 yang berhasil mengimpun tabungan terbesar per nasabah, deposito per nasabah yang berhasil dihimpunnya jumlahnya paling sedikit dibandingkan regional lainnya.

Sementara itu setiap pegawai penghimpunan dana BPRS, rata-rata mampu memelihara Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 411 juta rupiah. Nilai nominal DPK per pegawai terbesar rata-rata terdapat pada BPRS di wilayah Sumatera diikuti Jabotabek dan Jawa Barat masing-masing sebesar 592 juta, 405 juta, dan 375 juta rupiah.

(ii). Rata-rata jumlah penabung dan deposan

Dalam hal menjangkau nasabah dana, pada tahun 2001, BPRS di Indonesia rata-rata mampu meraih 1.545 penabung dan 39 deposan. Dari komposisi sumber dana tersebut tampak bahwa relatif lebih mudah bagi BPRS menghimpun dana masyarakat dalam bentuk

tabungan. Hal tersebut mengingat relatif tidak ada batasan minimal bagi masyarakat untuk menabung sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menabung. Selain itu karakteristik lain dari tabungan yaitu dapat diambil sewaktu-waktu juga sesuai dengan karakteristik masyarakat kecil yang terbatas sumber dananya. Pada sisi yang lain masyarakat harus menyediakan dana yang relatif cukup besar agar dapat menjadi deposan. Dengan jumlah yang besar juga memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi untuk menyimpan dana tersebut di BPRS.

Sementara itu setiap pegawai penghimpunan dana BPRS, rata-rata mampu memelihara nasabah dana sebanyak 566 orang. Jumlah nasabah per pegawai terbesar rata-rata terdapat pada BPRS di wilayah Sumatera diikuti Jawa Barat dan Jabotabek masing-masing sebesar 869, 653, dan 450 orang.

Dengan menggunakan seluruh rasio cakupan operasional sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa (a) BPRS menempatkan posisi wanita relatif sama dengan laki-laki dalam hal penghimpunan dana maupun PYD, (b) dalam periode pengamatan terdapat peningkatan kemampuan BPRS untuk menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan baik dari segi nilai maupun banyaknya nasabah yang bisa dilayani, (c) tabungan menjadi produk yang diminati nasabah BPRS karena karakteristiknya seperti nilai minimal tabungan yang kecil dan dapat diambil setiap saat, dan (d) fungsi intermediasi BPRS berjalan sangat baik karena semua dana yang dihimpun dari masyarakat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk PYD.

Penilaian Kinerja BPRS Menggunakan Metode CAMEL

Setelah seluruh indikator dari metode PI digunakan untuk menilai kinerja BPRS maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penilaian kinerja BPRS dengan metode yang sekarang ini dipergunakan Bank Indonesia yaitu CAMEL. Hasil penilaian tersebut nantinya akan dibandingkan dengan hasil menggunakan metode PI untuk melihat konsistensi penilaiannya. Berikut ini hasil penilaian kinerja BPRS dengan menggunakan metode CAMEL.

Dengan mengacu kepada penilaian akhir Tingkat Kesehatan Bank pada posisi akhir tahun 1999, 2000, dan 2001 yang diambil rata-ratanya dengan menggunakan skala 4 dimana 1 adalah nilai terbaik atau setara dengan predikat “Sehat” dan 4 adalah nilai terjelek atau setara dengan predikat “Tidak Sehat”. Hasil pengelompokkan tersebut adalah sebanyak 62.96% BPRS yang termasuk kategori I, 17.78% BPRS dengan kategori II, 8.89% BPRS dengan kategori III, dan 10.37% BPRS dengan kategori IV. Tabel 4.25 berikut ini memberikan gambaran perkembangan TKS BPRS di Indonesia.

Tabel 4.25. Perkembangan TKS BPRS di Indonesia

Kategori	1999	2000	2001
1	**60%**	**64%**	**64%**
2	**20%**	**20%**	**13%**
3	**11%**	**7%**	**9%**
4	**9%**	**9%**	**13%**

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan persentase BPRS yang baik yaitu dari 60% pada tahun 1999 menjadi 64% pada tahun 2001. BPRS yang sangat bermasalah (kategori IV) juga mengalami peningkatan dari 9% pada tahun 1999 menjadi 13% pada tahun 2001.

Konsentrasi BPRS dengan kategori III dan IV berada dalam wilayah Jabotabek dan Jawa Barat yang memang merupakan wilayah dengan BPRS terbanyak yaitu 45.67% dari 81 BPRS yang ada di seluruh Indonesia. Diluar wilayah tersebut secara umum memiliki TKS yang baik, bahkan untuk wilayah Jawa Timur seluruhnya masuk dalam kategori I.

Berdasarkan penilaian TKS BPRS selama tiga tahun terakhir diketahui bahwa dari kelima unsur CAMEL terdapat 2 unsur yang secara dominan memberikan kontribusi terhadap akhir penilaian TKS BPRS yaitu KAP dan manajemen. Sebanyak 49% BPRS yang termasuk dalam kategori II s.d. IV untuk faktor KAP dan manajemen masing-masing memiliki mean 3.3 dan 2.8 dengan modus 4 dan 3. KAP dan Manajemen memang memiliki keterkaitan. Apabila suatu bank mengelola usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian maka kecil kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah. Sebaliknya kalau manajemen BPRS mengelola aktiva produktifnya dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian maka besar kemungkinan akan timbulnya pembiayaan bermasalah yang ditandai dengan semakin memburuknya KAP BPRS. Dampak dari memburuknya KAP adalah menurunnya kemampulabaan bank dan apabila manajemen likuiditasnya juga tidak baik akan mendorong terjadinya *mismatch*.

Tiga unsur CAMEL lainnya yaitu kemampulabaan, likuiditas dan CAR mengikuti kinerja KAP dan Manajemen. KAP yang memburuk akan berakibat kepada menurunnya kemampulabaan bank dan likuiditas bank. Apabila bank menderita kerugian maka dengan sendirinya modal bank akan berkurang sehingga lambat lain kemampuan modal untuk menyerap kerugian menjadi semakin kecil. Pada sisi lain jika bank tidak mampu memenuhi kewajibannya karena terjadi mismatch dapat berakibat kepada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat yang bukan tidak mungkin menciptakan rush. Yaitu terjadinya penarikan besar-besar dana masyarakat. Jika hal tersebut terjadi sedangkan permodalan bank

terbatas maka bank menjadi insolven. Mengacu kepada cukup banyak BPRS yang memiliki KAP dan Manajemen jelek maka terdapat 30% BPRS yang memiliki kemampulabaan rendah (kategori II – IV) dan 11% BPRS yang memiliki permasalahan likuiditas (kategori II – IV).

Hasil penilaian TKS BPRS untuk unsur permodalan menunjukkan BPRS memiliki CAR yang memadai bahkan untuk BPRS yang masuk dalam kategori II sampai IV masih memiliki CAR dengan mean 1.4 dan modus 1. Hal yang menjadi catatan disini adalah kebijakan BI dengan menetapkan CAR BPRS sama dengan bank umum yaitu 8% untuk sehat minimum ternyata tidak terlalu sulit untuk dipenuhi oleh BPRS meskipun sudah termasuk dalam kategori IV. Hal tersebut tampak pada CAR industri BPRS yang jauh di atas standar BI yaitu sebesar 32%, 24% dan 24%. pada tahun 1999, 2000 dan 2001. Dalam periode tersebut hanya sekitar 11% BPRS yang memiliki CAR di bawah 8%.

Kesimpulan yang dapat diambil dengan menggunakan CAMEL plus untuk menilai TKS BPRS di Indonesia adalah (a) Lebih dari separo BPRS memiliki kinerja yang baik, (b) BPRS yang memiliki kinerja kurang baik karena mendapat penilaian rendah untuk unsur KAP dan manajemen, dan (c) tidak terlalu sulit bagi BPRS untuk memenuhi ketentuan CAR minimum BPRS yaitu 8% bahkan untuk BPRS dengan kategori IV.

Perbandingan Kinerja BPRS dengan Metode PI dan CAMEL

Dari hasil pengelompokan diketahui bahwa dengan menggunakan metode PI terdapat 42% BPRS yang termasuk dalam kelompok 1 dengan distribusi per regional sebagaimana tampak pada Tabel 4.26 di bawah ini.

Tabel 4.26. Kinerja BPRS dengan metode PI

Wilayah	P I	Konversi PI
Nasional	0,60	1
Sumatera	0,64	1
Jawa Timur	0,64	1
Jabotabek	0,53	0
Jawa Barat	0,54	0
Jateng / DIY	0,65	1
KTI	0,61	1

Dari tabel di atas, tampak bahwa untuk total nilai PI, terdapat 4 regional yang memiliki nilai PI di atas nasional yaitu Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY, dan KTI. Dari ke enam indikator maka kualitas portofolio, kemampulaban dan kemampuan finansial memberikan kontribusi terbesar dalam pemberian hasil akhir pada keempat wilayah tersebut.

Sedangkan dua daerah lainnya yaitu Jabotabek dan Jawa Barat memiliki nilai PI di bawah rata-rata nasional. Meskipun hanya dua regional yang memiliki nilai di bawah rata-rata, namun memberikan kontribusi dalam pembentukan nilai PI nasional. Hal tersebut karena Jabotabek dan Jawa Barat merupakan wilayah dengan konsentrasi BPRS cukup besar (44.58%).

Jika dengan menggunakan metode PI lebih dari separuh BPRS memiliki kinerja di bawah rata-rata industri maka dengan menggunakan metode CAMEL terdapat 81% BPRS yang termasuk dalam kelompok 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak BPRS yang masuk dalam kategori 1 dengan menggunakan metode CAMEL dibandingkan PI.

Gambar 4.2.
Perbandingan Kelompok BPRS dengan metode PI dan CAMEL

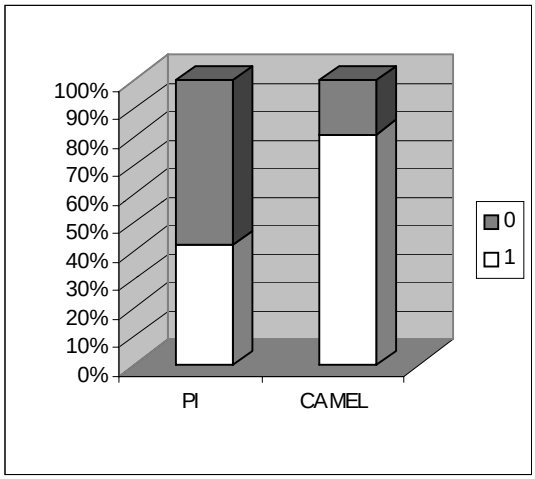

Dari hasil perbandingan nilai PI dengan CAMEL bagi tiap-tiap BPRS diketahui bahwa terdapat 60% BPRS yang hasil penilaian dengan metode PI maupun CAMEL mendapat nilai yang sama. Artinya jika dengan metode CAMEL diperoleh nilai 1 maka dengan metode PI juga menghasilkan nilai 1 demikian pula sebaliknya.

Adalah menarik bahwa dari 40% BPRS yang terdapat perbedaan hasil antara menggunakan metode PI dengan CAMEL memiliki pola yang sama yaitu apabila dengan metode CAMEL diperoleh nilai 0 maka metode PI juga mendapat nilai yang sama, namun jika dengan metode CAMEL diperoleh nilai 1 maka ada kemungkinan hasil dengan metode PI adalah 1 atau 0. Dengan kata lain jika hasil penilaian dengan metode PI adalah 0 maka dengan metode CAMEL dapat saja BPRS tersebut masuk kategori 0 atau 1. Ternyata dari 58% BPRS yang masuk dalam kategori 0 dengan metode PI hanya 32% diantaranya yang juga mendapat nilai 0 dengan metode CAMEL dan sisanya, yaitu 68% masih mendapat nilai

1 dengan metode CAMEL. Hasil perbandingan penggunaan metode PI dan CAMEL untuk menilai kinerja BPRS adalah sebagaimana formula di bawah ini:

Formula:

Jika PI = 1 maka CAMEL = 1 ……...…… (1)

Jika PI = 0 maka CAMEL = 1 atau 0 ……. (2)

Mengapa terdapat perbedaan hasil antara metode CAMEL dengan metode PI. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jika dilakukan perbandingan antar kelompok BPRS yang sama-sama memperoleh nilai PI sebesar 0, dari 32% BPRS yang masih mendapat nilai CAMEL sebesar 1, masih memiliki nilai yang baik yaitu 95% BPRS termasuk dalam kategori I untuk unsur CAR dan *Liquidity*, sedangkan unsur KAP dan manajemen terdapat 65% BPRS yang termasuk dalam kategori I dan II dan untuk kemampulabaan terdapat 76% BPRS masuk dalam kategori I dan II.

b. Sebagai pembanding untuk 58% BPRS yang memperoleh nilai PI sebesar 0, maka seluruh unsur PI mendapat nilai dibawah 66%. Yang berarti tidak ad satu unsur PI yang masuk kategori I. Diantara unsur PI maka *Productivity-Efficiency* dan *Outreach* memperoleh nilai terendah. Jika dalam CAR CAMEL mengacu kepada ketentuan minimal 8% maka standar PI menggunakan rata-rata industri dalam tiga tahun terakhir yaitu 32% ditambah dengan rasio *leverage*. Dengan standar yang tinggi tersebut maka unsur permodalan juga mendapat nilai yang rendah jauh dibawah nilai 66%.

Perbedaan hasil antara menggunakan metode PI dan CAMEL untuk menilai kinerja BPRS tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.3. Perbandingan Kinerja BPRS dengan Metode PI dan CAMEL

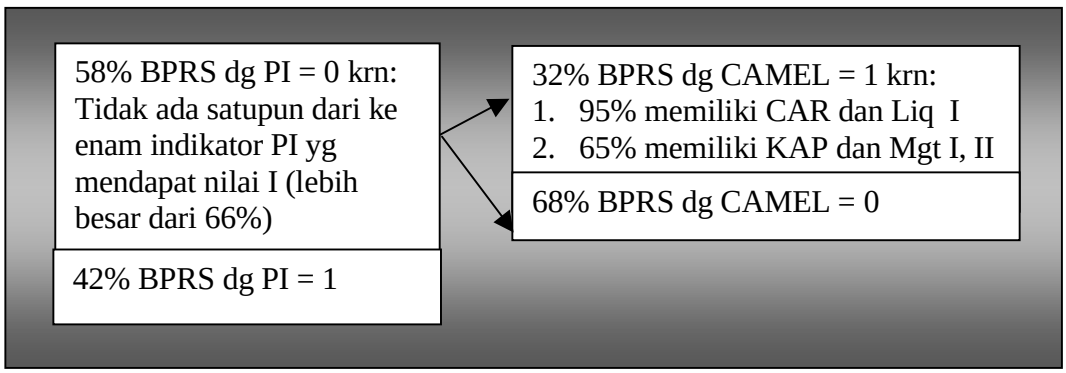

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, khususnya yang berkaitan dengan hasil penilaian kinerja BPRS dengan menggunakan metode PI, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas portofolio industri BPRS semakin membaik yang ditandai dengan adanya
2. perbaikan struktur pembiayaan yang diberikan. Namun demikian kualitas
3. portofolio industri BPRS masih belum memenuhi standar internasional kualitas portofolio LKM.
2. Tingginya ekspansi pembiayaan yang diberikan BPRS memberikan pengaruh terhadap perbaikan kualitas portofolio BPRS.
3. Pembiayaan bermasalah BPRS merata baik yang berskala besar maupun kecil.
4. Terjadi peningkatan produktifitas dan efisiensi industri BPRS dan telah memenuhi standar internasional LKM.
5. Industri BPRS dinilai mampu secara operasional namun belum mampu secara finansial karena masih rentan terhadap gejolak inflasi.
6. Terdapat kecenderungan menurun OSS dan FSS industri BPRS.
7. Kemampulabaan industri BPRS meningkat dari tahun ke tahun.
8. Dengan tingkat keuntungan yang dicapai BPRS dalam tiga tahun terakhir dinilai masih menguntungkan bagi investor.
9. Kemampulabaan BPRS dipengaruhi oleh kualitas portofolio dan tingkat efisiensi.
10. Leverage industri BPRS meningkat. Hal tersebut juga mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan BPRS dalam menghimpun dana masyarakat.
11. CAR industri BPRS tercatat rata-rata sebesar 30%, jauh di atas standar yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 8%.
12. BPRS menempatkan posisi wanita relatif sama dengan laki-laki dalam hal penghimpunan dana dan PYD.
13. Tabungan merupakan produk yg paling terjangkau nasabah BPRS.
14. Fungsi intermediasi industri BPRS berjalan dengan baik.
15. Dengan mengacu kepada standar PI nasional maka terdapat empat wilayah yang

memiliki BPRS dengan PI di atas rata-rata nasional, yaitu Sumatera, Jawa Tengah DIY, Jawa Timur dan KTI. Dari ke enam indikator maka kualitas portofolio, kemampulaban dan kemampuan finansial memberikan kontribusi terbesar dalam pemberian hasil akhir pada keempat wilayah tersebut. Sedangkan dua daerah lainnya yaitu Jabotabek dan Jawa Barat memiliki nilai PI di bawah rata-rata nasional. Meskipun hanya dua regional yang memiliki nilai di bawah rata-rata, namun memberikan kontribusi dalam pembentukan nilai PI nasional. Hal tersebut karena Jabotabek dan Jawa Barat merupakan wilayah dengan konsentrasi BPRS cukup besar (44.58%).

Kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari perbandingan antara metode PI dan metode CAMEL dalam penilaian kinerja BPRS adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan metode PI untuk menilai kinerja BPRS memberikan hasil yang konsisten dengan penggunaan metode CAMEL.
2. Penilaian kinerja BPRS dengan metode PI lebih hati-hati dibandingkan dengan CAMEL karena suatu BPRS yang sudah dinilai kurang baik kinerjanya masih mungkin mendapat predikat baik dalam metode CAMEL.
3. Penggunaan standar internasional yang dikombinasikan dengan standar industri dapat memberikan penilaian lebih obyektif mengenai kinerja BPRS.
4. Masing-masing metode memiliki keunggulan. Dalam metode PI terdapat kemampuan finansial serta cakupan operasional yang merupakan karakteristik LKM yang dimiliki oleh BPRS namun tidak memiliki penilaian manajemen sebagaimana metode CAMEL.
5. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya korelasi cukup kuat yaitu positif 40.6% dengan tingkat keyakinan 99% antara hasil penilaian kinerja BPS dengan menggunakan metode PI dan CAMEL. Adanya korelasi yang cukup kuat antara dua metode tersebut menunjukkan bahwa metode PI dapat dipergunakan sebagai alternatif ataupun pelengkap penilaian kinerja BPRS disamping metode CAMEL yang selama ini dipakai oleh Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Chaves and Gonzalez-Vega, Principles of Regulation and Prudential Supervision and their Relevance for Microinterprise Finance Organizations, 1994.

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Biro Perbankan Syariah-Bank Indonesia, 2002

Greuning, Hennie van, Gallardo, Joselito dan Randhawa, Bikki, A Framework for Regulating Microfinance Institutions, a policy research working paper, World Bank, 1999.

Harker, Patrick T., Zenios, Stavros A. (editor), Performance of Financial Institutions: efficiency, innovation, regulation, Cambridge University, UK, 2000

Ledgerwood, Joanna, Microfinance Hanbook: an institutional and financial perspective, the World Bank, Washington D.C., USA, 1999.

McMahon, Robert J., Bank Marketing Handbook, Bankers Publishing Co., Boston, USA, 1986.

Meyer, Richard L, Nagarajan,Geetha, Rural Financial Markets in Asia: Policies, Paradigms, and Performance, ADB, Oxford University Press, N.Y.,USA, 2000.

Santoso, Singgih, Buku Latihan SPSS Statitik Parametrik, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001

Setijawan, Edi, Strategy of The Central Bank of Indonesia to Support Rural Banks to Survive and Develop During Indonesia's Economic Crisis, Asian Institute of Management, Manila, 2001.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/58/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR, Bank Indonesia, 1995.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR tahun 1999 tentang BPR berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia, 1999.

The Microbanking Bulletin, a publication of the microfinance program at the Economic Institute, Boulder, Colorado, Issue No.2, July, 1998.

Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998.

Walpole, Ronald E., Pengantar Statistika Edisi ke-3, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Wright, Graham AN, Microfinance System, Designing Quality Financial for the Poor, The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh, 2000.

Wright, Peter, Kroll, Mark J., Parnell, John, Strategic Management: concepts and cases, 4th edition, Prentice Hall, NJ,